

Tahun Anggaran



# 2020

**Tingkat K/L**  
(Audited)

# LAPORAN KEUANGAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

**AUDITED**

# LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Telepon +6221-3850455 +6221-3853922

Faksimili +6221-3856809 +6221-3856826

Website : [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)



## Kata Pengantar



## Kata Pengantar

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai kewajiban, antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang dipimpinnya.

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa biaya untuk pelaksanaan tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, PPATK adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan PPATK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan PPATK untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 ini disusun dalam upaya menyajikan laporan keuangan tahun 2020 (*audited*) berbasis akrual yang lebih baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami senantiasa berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Kami berharap bahwa laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Public Governance*).

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan keuangan ini.

Jakarta, 4 Mei 2021,  
Kepala PPATK,



Dian Ediana Rae





## Daftar Isi

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran .....	vi
Pernyataan Tanggung Jawab .....	vi
Ringkasan Laporan Keuangan .....	1
Laporan Realisasi Anggaran .....	5
Neraca .....	6
Laporan Operasional .....	7
Laporan Perubahan Ekuitas .....	8
Catatan atas Laporan Keuangan .....	9
A. Penjelasan Umum .....	9
A.1. Dasar Hukum .....	9
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan .....	11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	13
A.4. Basis Akuntansi .....	14
A.5. Dasar Pengukuran .....	14
A.6. Kebijakan Akuntansi .....	14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	22
B.1. Pendapatan .....	23
B.2. Belanja .....	25
B.2.1. Belanja Pegawai .....	26
B.2.2. Belanja Barang .....	29
B.2.3. Belanja Modal.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	35
C.1. Aset Lancar .....	35
C.2. Aset Tetap .....	37
C.3. Aset Lainnya .....	45
C.4. Kewajiban .....	47
C.5. Ekuitas .....	48
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	49
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	59
F. Pengungkapan Lain-Lain .....	61



## Daftar Tabel dan Gambar



## Daftar Tabel

Tabel 1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	1
Tabel 2	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 .....	1
Tabel 3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja - Penanganan Pandemi COVID-19 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 .....	2
Tabel 4	: Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	2
Tabel 5	: Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	3
Tabel 6	: Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	3
Tabel 7	: Penggolongan Kualitas Piutang .....	18
Tabel 8	: Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap .....	20
Tabel 9	: DIPA PPATK Tahun 2020 .....	23
Tabel 10	: DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2020 .....	23
Tabel 11	: Rincian Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 .....	23
Tabel 12	: Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	25
Tabel 13	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 .....	25
Tabel 14	: Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	26
Tabel 15	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	26
Tabel 16	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 2019 .....	29
Tabel 17	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja - Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 .....	33
Tabel 18	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019 .....	34
Tabel 19	: Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	35
Tabel 20	: Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi Software Per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	36
Tabel 21	: Rincian Persediaan 31 Desember 2020 dan 2019 .....	37
Tabel 22	: Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	37
Tabel 23	: Mutasi Tanah Per 31 Desember 2020 .....	39
Tabel 24	: Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 .....	40
Tabel 25	: Penambahan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 .....	41
Tabel 26	: Penambahan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 .....	41
Tabel 27	: Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020 .....	43
Tabel 28	: Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2020 .....	44
Tabel 29	: Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 .....	44
Tabel 30	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 .....	45
Tabel 31	: Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	45
Tabel 32	: Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2020 .....	46
Tabel 33	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 .....	47
Tabel 34	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	47

## Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

---

Tabel 35	: Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	49
Tabel 36	: Perbandingan Rincian Beban Pegawai Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 .....	49
Tabel 37	: Perbandingan Rincian Beban Persediaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	51
Tabel 38	: Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	52
Tabel 39	: Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	55
Tabel 40	: Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	55
Tabel 41	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 .....	56
Tabel 42	: Rincian Transaksi Antar Entitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020.	59
Tabel 43	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja - Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 .....	64
Tabel 44	: Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2017 .....	66
Tabel 45	: Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 .....	66
Tabel 46	: Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 .....	66
Tabel 47	: Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi PPATK Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 .....	67
Tabel 48	: Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi PPATK Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019.....	69



## Daftar Gambar

Gambar 1 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang 31 Desember 2020

26



## Daftar Lampiran



## Daftar Lampiran

1. Neraca Percobaan Tingkat Kementerian/Lembaga Per 31 Desember 2020 .....	A
2. Neraca Tingkat Kementerian /Lembaga Per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	B
3. Laporan Operasional Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 .....	C
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 .....	D
5. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 .....	E
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja/Akun untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 .....	F
7. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Sumber Dana/ Program/ Kegiatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 .....	G
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 .....	H
9. Daftar Rekening Pemerintah .....	I
10. Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya dan Setara Kas .....	J
11. Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	K
12. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final .....	L
13. Catatan Ringkas Barang Milik Negara .....	M
14. Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Laporan Keuangan PPATK .....	N

**Pernyataan Tanggung Jawab**



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN K E P A L A

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826  
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 4 Mei 2021  
Kepala PPATK,



Dian Ediana Rae



---

---

## Ringkasan Laporan Keuangan

---

---

# RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 (*Audited*) telah disusun dan dijelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan PPATK untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp572.553.458. Realisasi Belanja PPATK untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp208.269.277.734 atau mencapai 85,37% dari alokasi anggaran sebesar Rp243.960.199.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran  
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Realisasi
Pendapatan	-	572,553,458	-	673,487,690
Belanja	243,960,199,000	208,269,277,734	85.37	195,685,169,459
Pembiayaan	-	-	-	-

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 menurut jenis belanja dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi (Neto)	% Realisasi
<b>Belanja Pegawai</b>	121,562,485,000	111,710,028,261	91.90
<b>Belanja Barang</b>	70,820,743,000	51,117,245,930	72.18
<b>Belanja Modal</b>	51,576,971,000	45,442,003,543	88.11
<b>Jumlah</b>	<b>243,960,199,000</b>	<b>208,269,277,734</b>	<b>85.37</b>

Pada tahun 2020, terjadi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO) sebagai pandemi di seluruh dunia. Hal tersebut berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga timbul Program Penanganan Pandemi COVID-19 yang bersifat darurat dan dalam pelaksanaannya memerlukan penanganan sangat cepat, mendesak, dan

masif. Realisasi Belanja - Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.308.548.051 atau mencapai 77,61% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.974.437.000.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja - Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dalam Tabel 3.

Tabel 3  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja - Penanganan Pandemi COVID-19  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi (Neto)	% Realisasi
<b>Belanja Barang</b>	<b>2,585,807,000</b>	<b>1,949,721,240</b>	<b>75.40</b>
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	872,160,000	714,121,036	81.88
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	183,600,000	130,614,686	71.14
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,530,047,000	1,104,985,518	72.22
<b>Belanja Modal</b>	<b>388,630,000</b>	<b>358,826,811</b>	<b>92.33</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	388,630,000	358,826,811	92.33
<b>Jumlah</b>	<b>2,974,437,000</b>	<b>2,308,548,051</b>	<b>77.61</b>

## 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019.

Nilai Aset PPATK per 31 Desember 2020 dicatat dan dijelaskan sebesar Rp524.818.592.846 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp5.674.238.159, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp503.526.544.834 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp15.617.809.853.

Nilai Kewajiban PPATK seluruhnya tersaji sebesar Rp396.379.135 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas PPATK dijelaskan sebesar Rp524.422.213.711.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 3.

Tabel 4  
Ringkasan Neraca  
per 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
			Nilai	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	5,674,238,159	4,271,598,205	1,402,639,954	32.84
Aset Tetap	503,526,544,834	489,008,463,430	14,518,081,404	2.97
Aset Lainnya	15,617,809,853	17,425,093,324	(1,807,283,471)	(10.37)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>524,818,592,846</b>	<b>510,705,154,959</b>	<b>14,113,437,887</b>	<b>2.76</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	396,379,135	845,274,066	(448,894,931)	(53.11)
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>396,379,135</b>	<b>845,274,066</b>	<b>(448,894,931)</b>	<b>(53.11)</b>
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	524,422,213,711	509,859,880,893	14,562,332,818	2.86
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>524,422,213,711</b>	<b>509,859,880,893</b>	<b>14,562,332,818</b>	<b>2.86</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>524,818,592,846</b>	<b>510,705,154,959</b>	<b>14,113,437,887</b>	<b>2.76</b>

### 3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp44.804.056, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp212.076.758.340, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp212.031.954.284). Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp587.934.145 sehingga Defisit-LO terjadi sebesar (Rp211.444.020.139).

Ringkasan Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 4.

Tabel 5  
Ringkasan Laporan Operasional  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
			Nilai	%
<b>Kegiatan Operasional</b>				
Pendapatan Operasional	44,804,056	53,673,413	(8,869,357)	(16.52)
Beban Operasional	212,076,758,340	191,316,335,654	20,760,422,686	10.85
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(212,031,954,284)</b>	<b>(191,262,662,241)</b>	<b>(20,769,292,043)</b>	<b>10.86</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	587,934,145	506,100,339	81,833,806	16.17
<b>Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>(211,444,020,139)</b>	<b>(190,756,561,902)</b>	<b>(20,687,458,237)</b>	<b>10.84</b>
Pos Luar Biasa	-	-	-	
<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>(211,444,020,139)</b>	<b>(190,756,561,902)</b>	<b>(20,687,458,237)</b>	<b>10.84</b>

### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp509.859.880.893 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp211.444.020.139), Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar (Rp296.305.181), dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp226.302.658.138, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp524.422.213.711.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 5.

Tabel 6  
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
			Nilai	%
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>509,859,880,893</b>	<b>252,540,258,562</b>	<b>257,319,622,331</b>	<b>101.89</b>
Surplus/Defisit LO	(211,444,020,139)	(190,756,561,902)	(20,687,458,237)	10.84
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	(296,305,181)	234,878,663,778	(235,174,968,959)	(100.13)
Transaksi Antar Entitas	226,302,658,138	213,197,520,455	13,105,137,683	6.15
<b>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b>	<b>14,562,332,818</b>	<b>257,319,622,331</b>	<b>(242,757,289,513)</b>	<b>(94.34)</b>
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>524,422,213,711</b>	<b>509,859,880,893</b>	<b>14,562,332,818</b>	<b>2.86</b>

## **5. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, antara lain perubahan manajemen, kegiatan yang dibiayai dari hibah dan Penanganan Pandemi COVID-19.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca per 31 Desember 2020, nilai Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh PPATK untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



**Laporan Realisasi Anggaran**

**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**  
**Laporan Realisasi Anggaran**  
**untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(Dalam Rupiah)**

LIRAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020		%	31 DESEMBER 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	572.553.458	-	673.487.690
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>572.553.458</b>	-	<b>673.487.690</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	121.562.485.000	111.710.028.261	91.90	81.764.770.304
Belanja Barang	B.2.2	70.820.743.000	51.117.245.930	72.18	65.669.965.628
Belanja Modal	B.2.3	51.576.971.000	45.442.003.543	88.11	48.250.413.527
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>243.960.199.000</b>	<b>208.269.277.734</b>	<b>85.37</b>	<b>195.685.169.459</b>

Jakarta, 4 Mei 2021

Kepala PPATK,-



Dian Ediana Rae



# Neraca





**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**  
**Neraca**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(Dalam Rupiah)**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
	<b>C.1</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	16,777,287
Belanja Dibayar Dimuka ( <i>Prepaid</i> )	C.1.2	3,395,512,025	2,195,433,272
Persediaan	C.1.3	2,278,726,134	2,059,387,646
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>5,674,238,159</b>	<b>4,271,598,205</b>
<b>Aset Tetap</b>			
	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2.1	235,129,558,040	233,761,358,040
Peralatan dan Mesin	C.2.2	174,237,300,592	146,478,871,735
Gedung dan Bangunan	C.2.3	226,403,549,867	224,201,982,974
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	235,602,000	235,602,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	463,185,968	382,506,987
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(132,942,651,633)	(116,051,858,306)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>503,526,544,834</b>	<b>489,008,463,430</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
	<b>C.3</b>		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	34,496,338,499	37,044,447,353
Aset Lain-lain	C.3.2	18,535,412,879	4,336,379,891
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(37,413,941,525)	(23,955,733,920)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>15,617,809,853</b>	<b>17,425,093,324</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>524,818,592,846</b>	<b>510,705,154,959</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
	<b>C.4</b>		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	388,947,555	810,628,363
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	2,176,160	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.3	5,255,420	17,868,416
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	-	16,777,287
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>396,379,135</b>	<b>845,274,066</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>396,379,135</b>	<b>845,274,066</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas</b>	<b>C.5</b>	524,422,213,711	509,859,880,893
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>524,422,213,711</b>	<b>509,859,880,893</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>524,818,592,846</b>	<b>510,705,154,959</b>

Jakarta, 4 Mei 2021

Kepala PPATK,


  
Dian Ediana Rae





# Laporan Operasional



**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**  
**Laporan Operasional**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	44,804,056	53,673,413
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>44,804,056</b>	<b>53,673,413</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	111,335,368,412	82,237,823,707
Beban Persediaan	D.3	2,704,496,163	3,750,619,452
Beban Barang dan Jasa	D.4	51,111,183,308	45,973,335,150
Beban Pemeliharaan	D.5	4,436,023,511	5,868,885,990
Beban Perjalanan Dinas	D.6	9,920,805,095	28,031,058,326
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	32,568,881,851	25,454,613,029
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>212,076,758,340</b>	<b>191,316,335,654</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(212,031,954,284)</b>	<b>(191,262,662,241)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	448,499,776	70,922,222
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	885,000	2,010,000
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>447,614,776</b>	<b>68,912,222</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	201,949,308	616,113,990
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	61,629,939	178,925,873
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>140,319,369</b>	<b>437,188,117</b>
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>587,934,145</b>	<b>506,100,339</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(211,444,020,139)</b>	<b>(190,756,561,902)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	D.12	<b>(211,444,020,139)</b>	<b>(190,756,561,902)</b>

Jakarta, 4 Mei 2021

Kepala PPATK,


  
Dian Ediana Rae



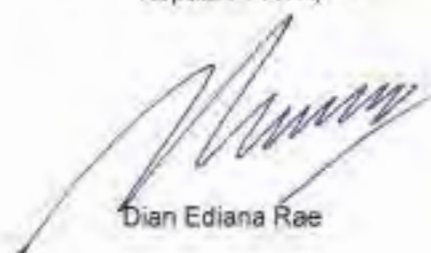


## Laporan perubahan Ekuitas

**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
**(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1	509,859,880,893	252,540,258,562
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(211,444,020,139)	(190,756,561,902)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(296,305,181)	234,878,663,776
Koreksi Atas Reklasifikasi			(406,756,943)
Selisih Revaluasi Aset			238,489,409,524
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(296,305,181)	(3,203,978,803)
Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	226,302,658,138	213,197,520,455
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		14,562,332,818	257,319,622,331
EKUITAS AKHIR	E.5	524,422,213,711	509,859,880,893

Jakarta, 4 Mei 2021  
 Kepala PPAK,

  
 Dian Ediana Rae





## Catatan atas Laporan Keuangan





## Catatan atas Laporan Keuangan

### Dasar Hukum

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Ulang Aset Tetap.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
8. Instruksi Presiden RI melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.



14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.5/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi COVID-19;

## A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Visi, Misi, dan Tujuan yang akan dicapai PPATK dituangkan dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 2020 s.d. 2024, sebagai berikut:

### 1. • Visi PPATK

Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.





2

## • Misi PPATK

- a. Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- b. Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- d. Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.

3

## • Tujuan

Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

4

## • Sasaran Strategis PPATK

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Sasaran Strategis PPATK selanjutnya akan dijelaskan ke dalam Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan Sasaran Kegiatan yaitu:
  - 1) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  - 2) Meningkatnya kualitas hasil riset dan pengembangan PPATK.
- b. Penguatan regulasi serta meningkatnya efektivitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
  - 1) Meningkatnya pemenuhan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  - 2) Meningkatnya kualitas layanan hukum PPATK.
- c. Meningkatnya peran pihak pelapor dalam mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:





• Sasaran Strategis PPATK (lanjutan)

- 1) Meningkatnya kualitas data pelaporan dari pihak pelapor.
- 2) Meningkatnya efektivitas pengawasan kepatuhan pihak pelapor.
- d. Meningkatnya kemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
  - 1) Meningkatnya kualitas Hasil Analisis PPATK.
  - 2) Meningkatnya kualitas Hasil Pemeriksaan PPATK.
  - 3) Meningkatnya efektivitas diseminasi produk intelijen PPATK dan pemberian dukungan penanganan perkara.
- e. Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
  - 1) Meningkatnya efektivitas kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  - 2) Meningkatnya kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).
- f. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
  - 1) Meningkatnya efektivitas layanan informasi publik PPATK.
  - 2) Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
  - 3) Meningkatnya kualitas Pendidikan dan pelatihan PPATK.
- g. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
  - 1) Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK.
  - 2) Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi PPATK.
- h. Meningkatnya kapabilitas organisasi PPATK dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
  - 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen internal PPATK.
  - 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan keuangan PPATK.
  - 3) Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK.
  - 4) Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dan ketatalaksanaan PPATK.





## • Sasaran Strategis PPATK (lanjutan)

- i. Meningkatnya peran APIP dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
  - 1) Meningkatnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK.
  - 2) Meningkatnya efektivitas pengawasan internal PPATK.

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan Keuangan

### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PPATK yang merupakan Lembaga Pemerintah dengan kode Bagian Anggaran (BA) 078, dan memiliki dua Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diterima. Satuan Kerja di PPATK terdiri dari Satuan Kerja Kantor Pusat PPATK (Satker 453374) dan Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Satker 417654).

Berdasarkan Surat Kepala PPATK Nomor T/232/KU.02/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 hal Permohonan Mengikuti Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan persetujuan Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 905/KMK.05/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III, PPATK mengimplementasikan aplikasi SAKTI dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sejak 1 Januari 2019.

Aplikasi SAKTI digunakan di PPATK pada Satker 417654 dan Satker 453374 untuk melakukan pencatatan secara transaksional berbasis akrual berdasarkan dokumen yang muncul pada saat transaksi dilakukan.

Pada aplikasi SAKTI, Modul Akuntansi dan Pelaporan menggantikan Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual (SAIBA) dalam penyusunan Laporan Keuangan, Modul Aset Tetap menggantikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Modul Persediaan menggantikan aplikasi Persediaan.

Perubahan mendasar pada Aplikasi SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan, yaitu terdapat *Open-Closing Period* untuk melakukan buka-tutup periode buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Sebelum melakukan tutup buku, operator Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan validasi seluruh transaksi dan memposting jurnal yang timbul dari modul terkait lainnya (Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, Modul Komitmen, dan Modul Bendahara).





### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Pada *closing period* Modul Akuntansi dan Pelaporan, secara otomatis modul lainnya tutup buku pada periode yang sama. Periode Akuntansi pada aplikasi SAKTI terdiri dari 12 periode normal (Januari-Desember), periode *unaudited*, dan periode *audited*.

Basis Akuntansi

### A.4. BASIS AKUNTANSI

PPATK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kedua basis akuntansi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

### A.5. DASAR PENGUKURAN

Dasar pengukuran yang diterapkan PPATK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

### A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang digunakan oleh PPATK. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PPATK diuraikan sebagai berikut:



## A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

*Pendapatan-LRA*

### 1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- e. Pendapatan-LRA di PPATK berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

*Pendapatan-LO*

### 2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada PPATK, yaitu:
  - 1) Pendapatan Sewa Lahan, Gedung dan Bangunan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui secara proporsional oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
  - 2) Pendapatan Denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, yaitu pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - 3) Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban-beban yang ada).
- d. Pendapatan dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- e. Pendapatan-LO di PPATK berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- f. Pendapatan PNBP-LO diukur dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Jumlah yang diterima dari wajib bayar atas pendapatan bukan pajak-LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di KUN.
  - 2) Jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerjasama dalam rangka perikatan.



## A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

*Belanja*

### 3. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Belanja dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

*Beban*

### 4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CaLK.

*Aset*

### 5. Aset

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh PPATK sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- c. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

#### 1) Aset Lancar

- a) Aset Lancar diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b) Aset Lancar terdiri dari kas atau setara kas, piutang dan persediaan.
- c) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dijelaskan di neraca dengan menggunakan nilai nominal rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dijelaskan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



### 1) Aset Lancar (lanjutan)

- d) Setara Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.
- e) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- f) Piutang dijelaskan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- g) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- h) Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, Kementerian Keuangan menetapkan bahwa seluruh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga untuk menggunakan metode harga perolehan terakhir dalam penilaian semua jenis persediaan. Selisih harga pembelian barang yang terjadi akan dilakukan koreksi nilai persediaan.
- i) Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - i. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
  - ii. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - iii. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih

### 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.



**2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (lanjutan)**

- b) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- c) Penggolongan Kualitas Piutang dijelaskan dalam Tabel 7.

Tabel 7  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
<b>Lancar</b>	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
<b>Kurang Lancar</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
<b>Diragukan</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
<b>Macet</b>	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

**3) Aset Tetap**

*Aset Tetap*

- a) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- b) Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - i. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - ii. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - iii. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- d) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor





### 3) Aset Tetap (lanjutan)

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- e) Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan.
- f) Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- g) Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Nomor S-363/PB/2020 tanggal 24 April 2020 hal Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) TA 2019 (*Audited*), telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit koreksi revaluasi Barang Milik Negara (BMN) antara PPATK, BPK dan Kementerian Keuangan dan disepakati Nota Kesepakatan Angka Asersi Final (NKF) Revaluasi BMN Nomor NKF Revaluasi-078/32/KN.2/2020 tanggal 28 April 2020, sehingga nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 Audited dan periode selanjutnya merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2019.
- h) Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan, antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.



**3) Aset Tetap (lanjutan)**

- i) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan Aset Tetap*

**4) Penyusutan Aset Tetap**

- a) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017.
- b) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - i. Tanah
  - ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
  - iii. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat dijelaskan dalam Tabel 8.

Tabel 8  
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**5) Piutang Jangka Panjang**

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan





**5) Piutang Jangka Panjang (lanjutan)**

Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- b) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c) TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- d) TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

**6) Aset Lainnya**

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- b) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud dijelaskan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 81/KM.6/2018.
- d) Aset Tak Berwujud pada PPATK berupa *software* dan memiliki masa manfaat terbatas hingga 4 tahun.
- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.



*Kewajiban*

**6. Kewajiban**

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - 1) Kewajiban Jangka Pendek
    - a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
    - b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - 2) Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**7. Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Induk Nomor SP DIPA-078.01-0/2020 tanggal 12 November 2019, pagu anggaran PPATK pada awal tahun 2020 sebesar Rp216.641.414.000 dan mengalami beberapa kali revisi anggaran, sehingga pagu anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 menjadi Rp243.960.199.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Satker 453374 Nomor SP DIPA-078.01.1.453374/2020 pada 1 Januari 2020 sebesar Rp191.344.438.000, dan sampai dengan 31 Desember 2020 telah mengalami 6 (enam) kali revisi sehingga pagu akhir menjadi Rp213.002.115.000.
2. DIPA Satker 417654 Nomor SP DIPA-078.01.1.417654/2020 pada 1 Januari 2020 sebesar Rp25.296.976.000, dan sampai dengan 31 Desember 2020 telah mengalami 7 (tujuh) kali revisi sehingga pagu akhir menjadi Rp30.958.084.000.

DIPA PPATK Tahun 2020 dijelaskan dalam Tabel 9.



Tabel 9  
DIPA PPATK Tahun 2020  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan/ Anggaran Awal	Estimasi Pendapatan/ Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>			
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>			
1	Belanja Pegawai	71.894.161.000	121.562.485.000
2	Belanja Barang	100.475.680.000	80.280.141.000
3	Belanja Modal	44.271.573.000	42.117.573.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>216.641.414.000</b>	<b>243.960.199.000</b>

DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2020 dijelaskan dalam Tabel 10.

Tabel 10  
DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2020  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Anggaran Setelah Revisi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	117.473.333.000	155.832.105.000
2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	99.168.081.000	88.128.094.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>216.641.414.000</b>	<b>243.960.199.000</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp572.553.458

### B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp572.553.458 dan Rp673.487.690. Keseluruhan Pendapatan PPATK merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dijelaskan dalam Tabel 11.

Tabel 11  
Rincian Realisasi Pendapatan  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020		
		Estimasi	Realisasi	%
1.	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	-	-	-
2.	<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	-	<b>572.553.458</b>	-
	a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	448.499.776	-
	b. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	32.191.060	-
	c. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
	d. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	70.779.810	-
	e. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	21.082.812	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>572.553.458</b>	-



### B.1. Pendapatan (lanjutan)

PNBP PPATK Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp572.553.458 terdiri dari:

- a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp448.499.776 atas hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan di Satker 453374.
- b. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah di Satker 453374 sebesar Rp32.191.060.
- c. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp70.779.810 dari pihak ketiga sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 di Satker 453374.
- d. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp21.082.812 dari pihak ketiga sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019, yaitu:
  - a. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp1.352.392 di Satker 453374.
  - b. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp19.730.420 di Satker 417654.

Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 14,99% dibandingkan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat penerimaan Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya di tahun 2020 karena pembayaran sewa lahan, gedung dan bangunan untuk ATM Bank Rakyat Indonesia sudah dibayar pada tahun 2019 untuk periode sewa 1 Juni 2019 s.d. 31 Mei 2021 (dua tahun).
- b. Tidak terdapat Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu karena Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK tahun 2018 sudah ditindaklanjuti pada tahun 2019 dan realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Terdapat penurunan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar 95,54% karena Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK tahun 2016 dan 2018 sudah ditindaklanjuti pada tahun 2019.

Namun, terdapat kenaikan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- a. Terdapat kenaikan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar 532,38% yang berasal dari hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan di Satker 453374.



### B.1. Pendapatan (lanjutan)

- b. Terdapat kenaikan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar 24,23% karena penyelesaian pekerjaan melewati batas waktu yang disepakati dalam kontrak.
- c. Terdapat kenaikan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar 39,53% sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019.

Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan pada Tabel 12.

Tabel 12  
Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2020	Tahun 2019	Rp	%
1.	Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	572.553.458	673.487.690	(100.934.232)	(14,99)
	a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	448.499.776	70.922.222	377.577.554	532,38
	b. Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya	-	25.226.000	(25.226.000)	(100,00)
	c. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	32.191.060	42.487.499	(10.296.439)	(24,23)
	d. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	11.100.249	(11.100.249)	(100,00)
	e. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	70.779.810	50.726.593	20.053.217	39,53
	f. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	21.082.812	473.025.127	(451.942.315)	(95,54)
	<b>Jumlah</b>	<b>572.553.458</b>	<b>673.487.690</b>	<b>(100.934.232)</b>	<b>(14,99)</b>

Realisasi Belanja (Neto)  
Rp208.269.277.734

### B.2. Belanja

Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp208.269.277.734 dan Rp195.685.169.459. Realisasi belanja di PPATK terdiri dari realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 menurut jenis belanja dijelaskan dalam Tabel 13.

Tabel 13  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)  
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

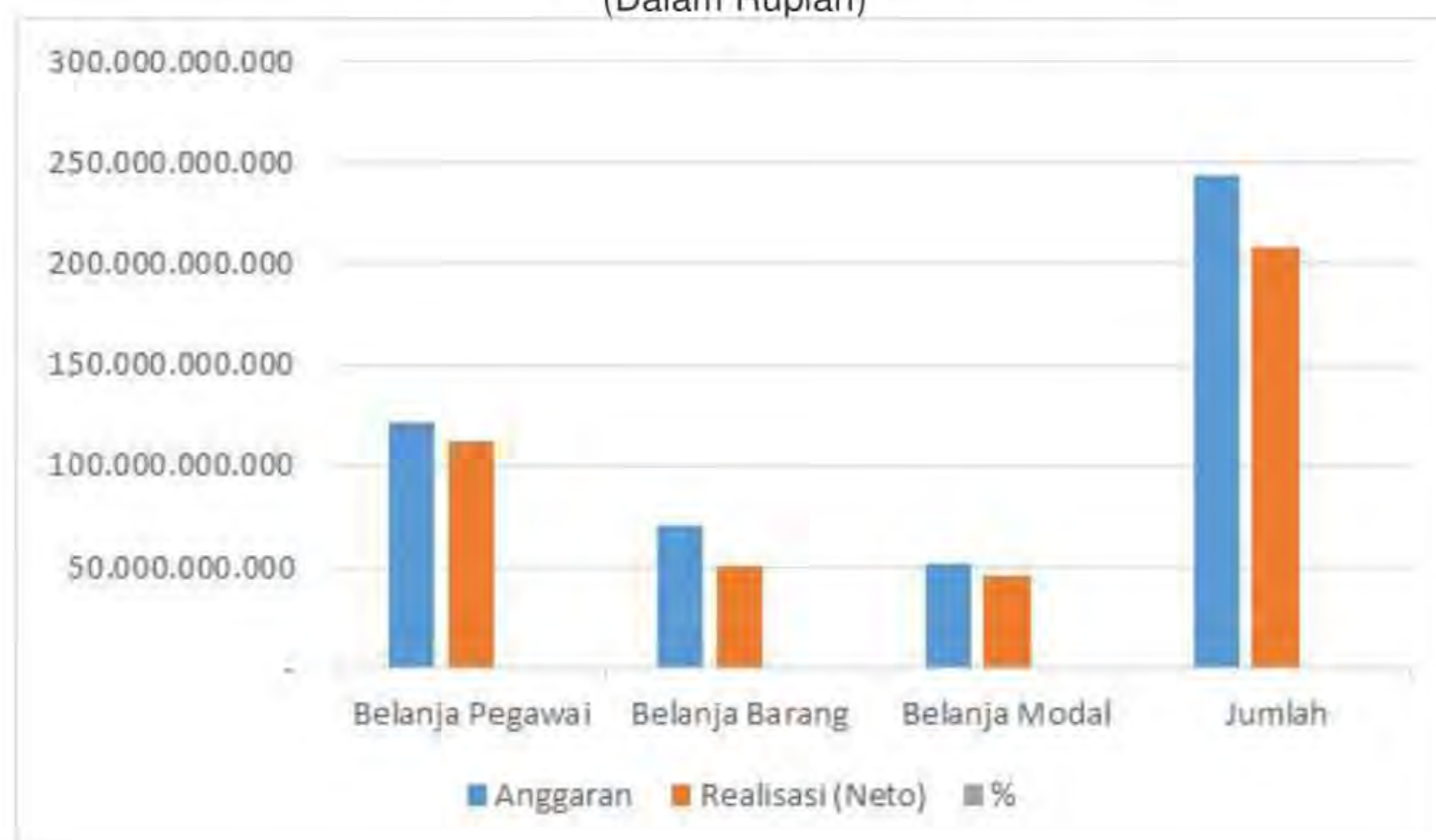
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi (Neto)	%
Belanja Pegawai	121,562,485,000	111,710,028,261	91.90
Belanja Barang	70,820,743,000	51,117,245,930	72.18
Belanja Modal	51,576,971,000	45,442,003,543	88.11
<b>Jumlah</b>	<b>243,960,199,000</b>	<b>208,269,277,734</b>	<b>85.37</b>



## B.2. Belanja (lanjutan)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)  
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,43% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019, yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Modal. Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 14.

Tabel 14  
Perbandingan Realisasi Belanja (Neto)  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi Anggaran 31 Desember 2020 (Neto)	Realisasi Anggaran 31 Desember 2019 (Neto)	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Pegawai	111.710.028.261	81.764.770.304	29.945.257.957	36,62
Barang	51.117.245.930	65.669.985.628	(14.552.739.698)	(22,16)
Modal	45.442.003.543	48.250.413.527	(2.808.409.984)	(5,82)
<b>Jumlah</b>	<b>208.269.277.734</b>	<b>195.685.169.459</b>	<b>12.584.108.275</b>	<b>6,43</b>

Realisasi Belanja  
Pegawai (Neto)  
Rp111.710.028.261

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Neto) masing-masing sebesar Rp111.710.028.261 dan Rp81.764.770.304. Realisasi Belanja Pegawai di PPATK pada tahun 2020 digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai di Satker 453374 dan Satker 417654.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai (Neto) Tahun 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 15.



## B.2.1 Belanja Pegawai (lanjutan)

Tabel 15  
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	<b>Belanja Bruto</b>				
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13.490.126.180	12.596.597.580	893.528.600	7,09
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	187.656	201.874	(14.218)	(7,04)
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	761.229.470	693.296.568	67.932.902	9,80
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	206.823.852	187.778.001	19.045.851	10,14
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	972.250.000	1.004.650.000	(32.400.000)	(3,23)
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	278.656.000	140.790.000	137.866.000	97,92
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	41.284.271	49.199.598	(7.915.327)	(16,09)
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	628.533.180	589.281.540	39.251.640	6,66
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.687.170.000	1.969.642.000	717.528.000	36,43
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	674.015.000	700.195.000	(26.180.000)	(3,74)
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1.821.000.000	2.290.700.400	(469.700.400)	(20,50)
511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	387.325.005	531.760.120	(144.435.115)	(27,16)
512111	Belanja Uang Honor Tetap	5.689.116.587	11.039.953.945	(5.350.837.358)	(48,47)
512211	Belanja Uang Lembur	116.880.000	220.013.000	(103.133.000)	(46,88)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	84.009.246.228	49.781.581.955	34.227.664.273	68,76
	<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>111.763.843.429</b>	<b>81.795.641.581</b>	<b>29.968.201.848</b>	<b>36,64</b>
	Pengembalian Belanja Pegawai	53.815.168	30.871.277	22.943.891	74,32
	<b>Total Belanja Pegawai</b>	<b>111.710.028.261</b>	<b>81.764.770.304</b>	<b>29.945.257.957</b>	<b>36,62</b>

Terdapat kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar 36,64%. Kenaikan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat kenaikan Belanja Gaji Pokok PNS, antara lain karena Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direkrut pada tahun 2019 sudah diangkat menjadi PNS pada tahun 2020, kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan pegawai dipekerjakan yang berstatus CPNS dan PNS, pembayaran Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketigabelas.
- Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS antara lain karena penambahan pegawai dipekerjakan dan perubahan status pernikahan PNS/CPNS.
- Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan Anak PNS, antara lain karena penambahan pegawai dipekerjakan dan penambahan tanggungan PNS/CPNS.
- Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan Fungsional PNS karena penambahan jumlah pegawai yang menerima tunjangan fungsional antara lain untuk Pranata Komputer, Pranata Humas, dan Auditor.
- Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan Beras PNS, antara lain karena penambahan pegawai dipekerjakan dan penambahan tanggungan PNS/CPNS.
- Terdapat kenaikan Belanja Uang Makan PNS karena kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan pegawai dipekerjakan yang berstatus CPNS dan PNS, dan penurunan perjalanan dinas karena pemberlakuan PSBB akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pegawai lebih sering bekerja baik WFH maupun WFO.





### B.2.1 Belanja Pegawai (lanjutan)

- g. Terdapat kenaikan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) karena Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direkrut pada tahun 2019 sudah diangkat menjadi PNS pada tahun 2020, kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan pegawai dipekerjakan yang berstatus CPNS dan PNS, serta terdapat kenaikan besaran Tunjangan Khusus/Kegiatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan PPATK dan Peraturan PPATK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan PPATK.

Penurunan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penurunan Belanja Tunjangan Struktural PNS karena terdapat pejabat struktural yang beralih menjadi pejabat fungsional.
- b. Penurunan Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara karena kekosongan Jabatan Wakil Kepala PPATK sejak Juni 2020.
- c. Penurunan Belanja Uang Honor Tetap karena sejak Januari 2020 pembayaran yang direalisasikan akun tersebut hanya digunakan untuk membayar honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja di Satker 417654 dan 453374. Untuk honor PPNPN yang dipekerjakan secara kontraktual sebagai tenaga pengamanan, pramubakti dan pengemudi dibebankan pada akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111).
- d. Penurunan Belanja Uang Lembur karena berdasarkan Surat Edaran Wakil Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Lingkungan PPATK sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2020 ditetapkan bahwa seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home-WFH*) dari tanggal 16 Maret sampai dengan 4 Juni 2020. Selanjutnya, diterapkan sistem kerja WFH dan *Work From Office* (WFO) selama masa pandemi di tahun 2020.

Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp53.815.168, terdiri dari:

- a. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp5.568.
- b. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp5.325.000.
- c. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp24.715.000.
- d. Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebesar Rp23.769.600.



Realisasi Belanja  
Barang (Neto)  
Rp51.117.245.930

## B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp51.117.245.930 dan Rp65.669.985.628.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 15.

Tabel 16  
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7.426.829.638	854.494.648	6.572.334.990	769,15
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9.956.700	208.653.501	(198.696.801)	(95,23)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	323.378.973	205.418.344	117.960.629	57,42
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	33.200.000	31.150.000	2.050.000	6,58
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	773.118.865	1.101.646.038	(328.527.173)	(29,82)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	714.335.956	-	714.335.956	-
521211	Belanja Bahan	838.104.930	3.329.853.082	(2.491.748.152)	(74,83)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	335.400.000	399.400.000	(64.000.000)	(16,02)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10.276.288.535	11.703.224.837	(1.426.936.302)	(12,19)
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	130.614.686	-	130.614.686	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.861.774.328	3.991.232.907	(1.129.458.579)	(28,30)
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai Meterai dan Leges	-	10.842.000	(10.842.000)	(100,00)
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	86.428.833	219.168.457	(132.739.624)	(60,57)
522111	Belanja Langganan Listrik	3.305.905.972	3.579.832.159	(273.926.187)	(7,65)
522112	Belanja Langganan Telepon	77.439.404	106.508.046	(29.068.642)	(27,29)
522113	Belanja Langganan Air	16.282.186	9.221.595	7.060.591	76,57
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.028.529.626	1.060.380.200	(31.850.574)	(3,00)
522131	Belanja Jasa Konsultan	2.337.915.141	997.249.000	1.340.666.141	134,44
522141	Belanja Sewa	867.264.310	905.492.370	(38.228.060)	(4,22)
522151	Belanja Jasa Profesi	2.883.500.000	1.458.100.000	1.425.400.000	97,76
522191	Belanja Jasa Lainnya	1.411.649.700	1.908.432.700	(496.783.000)	(26,03)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-	1.104.985.518	-	1.104.985.518	-
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.294.725.414	1.960.268.353	(665.542.939)	(33,95)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	103.983.000	71.624.405	32.358.595	45,18
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.165.651.345	1.448.210.448	(282.559.103)	(19,51)
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.710.635	40.000.000	(8.289.365)	(20,72)
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.794.157.060	2.050.014.051	(255.856.991)	(12,48)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	4.934.343.533	13.051.174.946	(8.116.831.413)	(62,19)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	238.446.820	608.626.003	(370.179.183)	(60,82)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.436.040.064	4.606.269.800	(3.170.229.736)	(68,82)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.771.994.553	3.896.111.897	(1.124.117.344)	(28,85)
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	648.684.557	6.045.093.645	(5.396.409.088)	(89,27)
	<b>Jumlah Belanja Barang Bruto</b>	<b>51.262.640.282</b>	<b>65.857.693.432</b>	<b>(14.595.053.150)</b>	<b>(22,16)</b>
	Pengembalian Belanja	145.394.352	187.707.804	(42.313.452)	(22,54)
	<b>Total Belanja Barang</b>	<b>51.117.245.930</b>	<b>65.669.985.628</b>	<b>(14.552.739.698)</b>	<b>(22,16)</b>

Terdapat penurunan Realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 22,16%.

Penurunan realisasi Belanja Barang, disebabkan hal-hal sebagai berikut:



### B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

- a. Penurunan Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh karena berdasarkan Surat Edaran Wakil Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Lingkungan PPATK sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2020 ditetapkan bahwa seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home-WFH*) dari tanggal 16 Maret sampai dengan 4 Juni 2020. Kebijakan WFH menyesuaikan dengan kebijakan PSBB di wilayah kedudukan kantor PPATK. Selanjutnya, diterapkan sistem kerja WFH dan Work From Office (WFO) selama masa pandemi di tahun 2020.
- b. Penurunan Belanja Barang Operasional Lainnya karena diberlakukannya sistem kerja WFH.
- c. Penurunan Belanja Bahan karena diberlakukannya sistem kerja WFH dan koordinasi dilaksanakan melalui surat elektronik dan rapat secara daring, sehingga frekuensi rapat koordinasi dalam rangka kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor, kegiatan pemeriksaan dan audit kepada Pihak Pelapor serta kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK secara tatap muka langsung menjadi berkurang.
- d. Penurunan Belanja Honor Output Kegiatan karena terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan sebagai akibat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di beberapa daerah yang menjadi pusat penyebaran kasus Covid-19.
- e. Penurunan Belanja Barang Non Operasional Lainnya karena terdapat penundaan pengadaan belanja barang akibat pandemi Covid-19.
- f. Penurunan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk bekerja secara WFH dan terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan pengadaan sebagai akibat dari pemberlakuan PSBB.
- g. Penurunan Belanja Barang Persediaan Pita Cukai Meterai dan Leges karena belanja materai dibebankan pada akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811).
- h. Penurunan Belanja Barang Persediaan Lainnya karena terdapat penurunan pengadaan obat-obatan di klinik Satker Pusat dan terdapat ralat spm/akun atas pembelian penambah daya tahan tubuh dalam awal masa pandemi Covid-19 di Satker 417654 yang sebelumnya menggunakan akun Belanja Barang Persediaan Lainnya menjadi Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19.
- i. Penurunan Belanja Langganan Listrik karena terdapat penurunan penggunaan listrik di Satker 417654 dan 453374 karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan koordinasi dilaksanakan melalui surat elektronik dan rapat secara daring.



### B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

- j. Penurunan Belanja Langganan Telepon karena pemberlakuan sistem kerja WFH, sehingga koordinasi dilaksanakan melalui surat elektronik dan rapat secara daring.
- k. Penurunan Belanja Jasa Lainnya karena penundaan pelaksanaan kegiatan sebagai akibat dari pemberlakuan PSBB.
- l. Penurunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan karena terdapat pemberlakuan PSBB dan penugasan seluruh pegawai PPATK untuk WFH, sehingga terdapat penundaan kegiatan pengadaan di Satker 453374. Selain itu, Gedung Kantor Satker 453374 sedang dilakukan *re-layout* dengan menggunakan belanja modal.
- m. Penurunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin antara lain karena terdapat penurunan penggunaan atau pembelian bahan bakar kendaraan dinas Eselon II dan operasional karena pemberlakuan sistem kerja WFH pada masa pandemi Covid-19.
- n. Penurunan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin karena terdapat penundaan kegiatan pengadaan sejak diberlakukan sistem kerja WFH dan pemberlakuan PSBB.
- o. Penurunan Belanja Perjalanan Biasa karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan pemberlakuan PSBB, sehingga kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK dan koordinasi eksternal dilakukan melalui surat elektronik dan rapat secara daring.
- p. Penurunan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan pemberlakuan PSBB, sehingga kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK dan koordinasi eksternal dilakukan melalui surat elektronik dan rapat secara daring.
- q. Penurunan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan pemberlakuan PSBB, sehingga kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK dan koordinasi eksternal dilakukan melalui surat elektronik dan rapat secara daring.
- r. Penurunan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan pemberlakuan PSBB, sehingga kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK dan koordinasi eksternal dilakukan melalui surat elektronik dan rapat secara daring.
- s. Penurunan Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan pemberlakuan *lockdown* di luar negeri, serta terdapat penundaan kegiatan dari pihak penyelenggara di luar negeri.

Kenaikan Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang signifikan, antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kenaikan Belanja Keperluan Perkantoran karena terdapat pembayaran honor PPNPN yang dipekerjakan secara kontraktual sebagai tenaga pengamanan, pramubakti dan



### B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

pengemudi, kegiatan dalam rangka pecegahan dan penanganan Covid-19 pada masa awal pandemi, dan pengadaan tes kesehatan bagi pegawai.

- b. Kenaikan Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat karena terdapat peningkatan pengiriman surat dinas terkait penundaan kegiatan diklat secara klasikal di masa awal pandemi Covid-19, pemberitahuan diklat secara jarak jauh/secara virtual, pengiriman sertifikat dan souvenir ke peserta pelatihan, serta pengiriman dokumen pihak eksternal.
- c. Kenaikan Belanja Honor Operasional Satuan Kerja karena terdapat pembebanan pembayaran honor bendahara pengeluaran di Satker 453374 dan Satker 417654.
- d. Kenaikan Belanja Langganan Air antara lain karena pemasangan fasilitas untuk cuci tangan sebelum memasuki gedung kantor PPATK.
- e. Kenaikan Belanja Jasa Konsultan karena terdapat konsultasi *plumbing* dan perencanaan konstruksi *relayout* di Satker 453374.
- f. Kenaikan Belanja Jasa Profesi antara lain dikarenakan pembayaran honorarium narasumber Eselon II dan III terkait diklat dan sosialisasi di Satker 417654.
- g. Kenaikan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan karena terdapat pembelian alat listrik dan lampu Gedung Pusdiklat APUPPT.

Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Barang sebesar Rp145.394.352, yang terdiri dari:

- a. Pengembalian Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp214.920.
- b. Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp2.210.000.
- c. Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp13.440.000.
- d. Pengembalian Belanja Jasa Profesi sebesar Rp20.825.000.
- e. Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp74.782.432.
- f. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp3.600.000.
- g. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp12.368.000.
- h. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp17.954.000.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, diatur bahwa realisasi belanja yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di PPATK dibebankan pada akun sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 sudah direalisasikan 81,88% atau sebesar Rp714.121.036 dari anggaran sebesar Rp872.160.000 yang digunakan untuk:



### B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

- a. Vitamin penambah daya tahan tubuh.
  - b. Pengadaan obat-obatan dan bahan-bahan Klinik Gigi dan Klinik Umum dalam rangka penanganan Covid-19.
  - c. Bahan Disinfektan.
  - d. Pengadaan Masker/Hand Sanitizer.
  - e. Langganan Aplikasi Zoom untuk rapat secara daring.
  - f. Paket data dalam rangka rapat secara daring selama WFH.
2. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 sudah direalisasikan 71,14% atau sebesar Rp183.600.000 dari anggaran sebesar Rp130.614.686, yaitu untuk konsumsi pegawai yang melaksanakan kegiatan piket di kantor pada masa awal pandemi.
  3. Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 sudah direalisasikan 72,22% atau sebesar Rp1.530.047.000 dari anggaran sebesar Rp1.104.985.518 yaitu prosedur pemeriksaan kesehatan pegawai untuk pelaksanaan tes Covid-19 dan jasa penyemprotan disinfektan Gedung PPATK dan Pusdiklat APUPPT.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja - Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dalam Tabel 17.

Tabel 17  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja - Penanganan Pandemi COVID-19  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi (Neto)	% Realisasi
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	872.160.000	714.121.036	81,88
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	183.600.000	130.614.686	71,14
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.530.047.000	1.104.985.518	72,22
<b>Jumlah</b>		<b>2.585.807.000</b>	<b>1.949.721.240</b>	<b>75,40</b>

Realisasi Belanja Modal (Neto)  
Rp45.442.003.543

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp45.442.003.543 dan Rp48.250.413.527. Terjadi penurunan Realisasi Belanja Modal dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 5,82%, antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penurunan Belanja Modal Tanah karena realisasi pengadaan tanah tahun 2020 di Satker 417654 hanya dua unit dibandingkan tahun 2019 sejumlah tiga unit.





### B.2.3 Belanja Modal (lanjutan)

2. Penurunan Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan karena pada tahun 2020 tidak terdapat anggaran terkait honorarium tim pengadaan tanah di Satker 417654.
3. Penurunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan karena beberapa pengadaan terkait belanja modal dalam rangka penambahan nilai Gedung dan Bangunan tidak terealisasi di Satker 417654.
4. Penurunan Belanja Modal Lainnya karena pengadaan dalam rangka perolehan aset tak berwujud tidak terealisasi di Satker 453374.

Kenaikan Belanja Modal yang signifikan, antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kenaikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I dan II di Satker 453374.
  - b. Pengadaan *hardware* sistem informasi dan teknologi di Satker 453374.
  - c. Pengadaan perangkat komunikasi di Satker 453374.
  - d. Pengadaan peralatan kehumasan di Satker 453374.
  - e. Pengadaan fasilitas perkantoran di Satker 417654 dan 453374.
2. Kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena terdapat pengadaan dua unit bangunan di Satker 417654.

Selain itu, terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19 yang sudah direalisasikan 92,33% atau sebesar Rp358.826.811 dari anggaran sebesar Rp388.630.000 yang digunakan untuk pembelian alat pendeteksi suhu tubuh.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 18.

Tabel 18  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	<b>Belanja Bruto</b>				
531111	Belanja Modal Tanah	1.368.200.000	1.650.522.400	(282.322.400)	(17,11)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.750.465.578	28.362.492.507	8.387.973.071	29,57
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	358.826.811	-	358.826.811	-
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	470.000.000	452.540.000	17.460.000	3,86
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	-	64.302.500	(64.302.500)	(100,00)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.035.166.893	3.018.065.485	(982.898.592)	(32,57)
536111	Belanja Modal Lainnya	4.459.344.261	14.702.490.635	(10.243.146.374)	(69,67)
	<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>45.442.003.543</b>	<b>48.250.413.527</b>	<b>(2.808.409.984)</b>	<b>(5,82)</b>
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
	<b>Total Belanja Modal</b>	<b>45.442.003.543</b>	<b>48.250.413.527</b>	<b>(2.808.409.984)</b>	<b>(5,82)</b>



## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### ASET

Aset Lancar  
Rp5.674.238.159

#### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.674.238.159 dan Rp4.271.598.205.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar PPATK Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 32,84% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Rincian Aset Lancar PPATK per 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 19.

Tabel 19  
Rincian Aset Lancar  
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

No.	Aset Lancar	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	16.777.287	(16.777.287)	(100,00)
2	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	3.395.512.025	2.195.433.272	1.200.078.753	54,66
3	Persediaan	2.278.726.134	2.059.387.646	219.338.488	10,65
	<b>Jumlah</b>	<b>5.674.238.159</b>	<b>4.271.598.205</b>	<b>1.402.639.954</b>	<b>32,84</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0

#### C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP dan LS ke Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan dan disetorkan kembali ke Kas Negara.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp16.777.287. Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran karena seluruhnya telah disetor ke Negara.

Belanja Dibayar Dimuka  
(prepaid)  
Rp3.395.512.025

#### C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.395.512.025 dan Rp2.195.433.272. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh, tetapi barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2020, terdiri dari:

1. Biaya perpanjangan lisensi *software* di Satker 453374 yang sudah dibayar secara penuh sampai dengan 31 Desember 2020, tetapi jangka waktu lisensinya melewati 31 Desember 2020 sebesar Rp3.388.681.525.

Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi *Software* pada PPATK per 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 20.



C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) - lanjutan

Tabel 20  
Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi Software  
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian Perpanjangan Lisensi	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	AD 360 Manage Engine	21.685.714	12.156.266	9.529.448	78,39
2	Adobe Creative Cloud	78.995.714	-	78.995.714	-
3	Application Manager	20.277.473	8.558.208	11.719.265	136,94
4	Asset Explorer	18.434.066	7.775.236	10.658.830	137,09
5	Cisco	53.177.143	58.098.082	(4.920.939)	(8,47)
6	Coreldraw	12.009.836	-	12.009.836	-
7	Core Switch	-	58.634.521	(58.634.521)	(100,00)
8	DNS Umbrella	35.523.956	48.112.077	(12.588.121)	(26,16)
9	ESTIM	25.712.877	33.331.507	(7.618.630)	(22,86)
10	Firewall	413.637.931	364.501.630	49.136.301	13,48
11	Juniper	608.173.770	-	608.173.770	-
12	McAfee	465.069.000	429.000.000	36.069.000	8,41
13	Mdaemon	92.019.231	50.970.082	41.049.149	80,54
14	Microsoft Office 365	281.344.081	162.411.820	118.932.261	73,23
15	Mobile Device Management	46.508.242	-	46.508.242	-
16	NAS	243.333.331	290.207.650	(46.874.319)	(16,15)
17	Oracle	362.251.535	324.236.897	38.014.638	11,72
18	Site Recovery Manager	11.398.327	8.843.890	2.554.437	28,88
19	SSL	82.371.859	-	82.371.859	-
20	Support Server	-	78.983.014	(78.983.014)	(100,00)
21	Tableau	164.116.434	-	164.116.434	-
22	Vcenter	28.023.346	26.780.769	1.242.577	4,64
23	Verisign SSL Certificates	40.141.129	48.116.953	(7.975.824)	(16,58)
24	Veritas Netbackup	59.317.500	18.166.575	41.150.925	226,52
25	Vmware	65.268.923	93.524.324	(28.255.401)	(30,21)
26	VPN	8.425.275	14.627.596	(6.202.321)	(42,40)
27	WAF Support + RMA	151.464.832	58.396.175	93.068.657	159,37
<b>Jumlah Perpanjangan Lisensi 2020</b>		<b>3.388.681.525</b>	<b>2.195.433.272</b>	<b>1.193.248.253</b>	<b>54,35</b>

2. Hak fasilitas Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp6.830.50000 pada Satker 417654 untuk pemeliharaan UPS yang berlaku sampai dengan bulan Juni 2021.

Persediaan  
Rp2.278.726.134

## C.1.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp2.278.726.134 dan Rp2.059.387.646.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, untuk dijual, atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Seluruh persediaan pada tanggal pelaporan dalam kondisi baik.



**C.1.3. Persediaan (lanjutan)**

Persediaan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 28,47% jika dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2019 karena terdapat peningkatan Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan dan Bahan Baku. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 21.

Tabel 21  
Rincian Persediaan  
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Konsumsi	1.879.143.339	1.689.478.823	189.664.516	11,23
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	224.869.339	169.155.503	55.713.836	32,94
3	Bahan Baku	20.924.200	18.587.800	2.336.400	12,57
4	Suku Cadang	92.320.537	113.547.501	(21.226.964)	(18,69)
5	Pita Cukai Materai dan Leges	-	750.000	(750.000)	(100,00)
6	Persediaan Lainnya	61.468.719	67.868.019	(6.399.300)	(9,43)
<b>Jumlah</b>		<b>2.278.726.134</b>	<b>2.059.387.646</b>	<b>219.338.488</b>	<b>10,65</b>

Aset Tetap  
Rp503.526.544.834

**C.2 Aset Tetap**

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp503.526.544.834 dan Rp489.008.463.430 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 2,97% jika dibandingkan dengan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2019 karena terdapat penambahan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Aset Tetap Lainnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Barang Milik Negara (BMN) Nomor LHIP-356 s.d. LHIP-358/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019, Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2020 merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2019 sebagaimana dijelaskan pada Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 *Audited*.

Rincian Aset Tetap PPATK per 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 22.

Tabel 22  
Rincian Aset Tetap  
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	235.129.558.040	233.761.358.040	1.368.200.000	0,59
2	Peralatan dan Mesin	174.237.300.592	146.478.871.735	27.758.428.857	18,95
3	Gedung dan Bangunan	226.403.549.867	224.201.982.974	2.201.566.893	0,98
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.602.000	235.602.000	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	463.185.968	382.506.987	80.678.981	21,09
<b>Jumlah</b>		<b>636.469.196.467</b>	<b>605.060.321.736</b>	<b>31.408.874.731</b>	<b>5,19</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(132.942.651.633)</b>	<b>(116.051.858.306)</b>	<b>(16.890.793.327)</b>	<b>14,55</b>
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>503.526.544.834</b>	<b>489.008.463.430</b>	<b>14.518.081.404</b>	<b>2,97</b>



Tanah  
Rp235.129.558.040

### C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki PPATK per 31 Desember 2020 dan 2019 yaitu sebesar Rp235.129.558.040 dan Rp233.761.358.040.

Aset PPATK berupa tanah sebesar Rp235.129.558.040, terdiri dari:

1. Tanah seluas 4.500 m<sup>2</sup> berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat senilai Rp194.364.000.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada Tahun 2007.
2. Tanah seluas 5.648 m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat senilai Rp8.256.529.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada Tahun 2010.
3. Tanah seluas 9.510 m<sup>2</sup> berlokasi di Jl. Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat senilai Rp28.784.107.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KM.6/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PPATK dan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-1705/KN/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal Roya Hak Tanggungan SHM No. 87/Cimpaeun.
4. Tanah seluas 120 m<sup>2</sup> berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 86 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A5, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp332.436.600. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 9 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014.
5. Tanah seluas 120 m<sup>2</sup> berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A9, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp394.585.440. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 02 tanggal 16 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014.
6. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp528.900.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan BAST No. BAST-053A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 9 September 2019.



**C.2.1 Tanah (lanjutan)**

7. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp490.200.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan BAST No. BAST-061A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 31 Desember 2019.
8. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp610.600.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan BAST No. BAST-062A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 31 Desember 2019.
9. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp770.350.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Perj-056/PL.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan BAST Nomor BAST-056.12/PL.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
10. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp597.850.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Perj-057/PL.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan BAST Nomor BAST-057.12/PL.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Mutasi Tanah per 31 Desember 2020 dijelaskan dalam Tabel 23.

Tabel 23  
Mutasi Tanah  
Per 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>233.761.358.040</b>
Tanah (Lokasi Jakarta Pusat)	194.364.000.000
Tanah (Lokasi Cianjur Jawa Barat)	8.256.529.000
Tanah (Lokasi Depok Jawa Barat)	31.140.829.040
<b>Mutasi tambah tahun 2020:</b>	
<i>Pembelian:</i>	<i>1.350.000.000</i>
Pengadaan Tanah lokasi Puri Cimanggis Permai No A12 Jl. Raya Tapos No 82 Depok	760.000.000
Pengadaan Tanah Lokasi Puri Cimanggis Permai No A6 Jl. Raya Tapos No 82 Depok	590.000.000
<i>Pengembangan Melalui KDP:</i>	<i>18.200.000</i>
Biaya Pengadaan Pembuatan Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Cimpaeun Lokasi Puri Cimanggis Permai No A12 Jl. Raya Tapos No 82 Depok	10.350.000
Biaya Pengadaan Pembuatan Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Cimpaeun Lokasi Puri Cimanggis Permai No A6 Jl. Raya Tapos No 82 Depok	7.850.000
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>1.368.200.000</b>
<b>Mutasi kurang tahun 2020:</b>	
Revaluasi Aset	-
Reklasifikasi	-
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>-</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>1.368.200.000</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>235.129.558.040</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>235.129.558.040</b>



Peralatan dan Mesin  
Rp174.237.300.592

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas dengan nilai kapitalisasi minimal Rp1.000.000/unit. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp174.237.300.592 dan Rp146.478.871.735. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp114.175.260.665.

Mutasi peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel 24.

Tabel 24  
Mutasi Peralatan dan Mesin  
Per 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>146.478.871.735</b>
<i>Mutasi tambah tahun 2020:</i>	
Pembelian dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.109.292.389
Reklasifikasi Masuk	18.730.312.535
Transfer Masuk	2.041.283.226
Utang Yang Belum Ditagihkan atas pembelian Peralatan dan Mesin	2.176.160
Perolehan Lainnya	5.565.414.800
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>63.448.479.110</b>
<i>Mutasi kurang tahun 2020:</i>	
Penghentian	(9.641.359.987)
Reklasifikasi Keluar	(18.660.387.240)
Transfer Keluar	(2.041.283.226)
Reklasifikasi ke BMN Ekstrakomptabel	(102.805.000)
Koreksi Pencatatan	(5.244.214.800)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(35.690.050.253)</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>27.758.428.857</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>174.237.300.592</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(114.175.260.665)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>60.062.039.927</b>

Transaksi mutasi penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp63.448.479.110, terdiri dari:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang sudah terealisasi pada Tahun 2020 sebesar Rp37.109.292.389.
2. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp18.730.312.535, yaitu:
  - a. Reklasifikasi Masuk berupa Alat Kantor/Rumah Tangga sebesar Rp148.575.295.
  - b. Reklasifikasi Masuk berupa Alat Studio Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp6.930.000.
  - c. Reklasifikasi Masuk berupa Komputer sebesar Rp18.574.807.240.
3. Transfer Masuk berupa Komputer ke Satker 417654 sebesar Rp5.565.414.800.
4. Hasil Reklasifikasi melalui Perolehan Lainnya sebesar Rp1.174.800.000.
5. Utang Yang Belum Ditagihkan atas pembelian Peralatan dan Mesin berupa tenda disinfektan sebesar Rp2.176.160. Transaksi ini sudah dicatat di Modul Aset Tetap, tetapi belum dilakukan pembayaran.

Mutasi pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp3.818.168.226, terdiri dari:





**C.2.2 Peralatan dan Mesin (lanjutan)**

1. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp9.641.359.987.
2. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp18.660.387.240, yaitu:
  - a. Reklasifikasi Keluar berupa Alat Kantor/Rumah Tangga sebesar Rp6.930.000.
  - b. Reklasifikasi Keluar berupa Alat Studio Komunikasi sebesar Rp78.650.000.
  - c. Reklasifikasi Keluar berupa Komputer sebesar Rp18.574.807.240.
3. Transfer Keluar berupa Komputer sebesar Rp2.041.283.226.
4. Reklasifikasi ke BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp102.805.000.
5. Koreksi Pencatatan sebesar Rp5.244.214.800.

Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin dijelaskan dalam Tabel 25.

Tabel 25  
Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin  
Per 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Penambahan					Total
		Pembelian	Reklasifikasi Masuk	Transfer Masuk	Utang	Perolehan Lainnya	
1	Alat Besar	-	-	-	-	760,100,000	760,100,000
2	Alat Angkutan	2,235,006,876	-	-	-	-	2,235,006,876
3	Alat Bengkel dan Alat	6,206,420	-	-	-	-	6,206,420
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3,156,458,169	148,575,295	-	-	2,850,084,600	6,155,118,064
5	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	6,557,110,720	6,930,000	-	-	-	6,564,040,720
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	155,143,998	-	-	-	-	155,143,998
7	Alat Laboratorium	318,393,075	-	-	-	780,430,200	1,098,823,275
8	Alat Persenjataan	19,998,000	-	-	-	-	19,998,000
9	Komputer	24,575,461,131	18,574,807,240	2,041,283,226	-	1,174,800,000	46,366,351,597
10	Alat Keselamatan Kerja	13,084,000	-	-	2,176,160	-	15,260,160
11	Peralatan Proses/Produksi	70,950,000	-	-	-	-	70,950,000
12	Peralatan Olah Raga	1,480,000	-	-	-	-	1,480,000
	<b>Jumlah</b>	<b>37,109,292,389</b>	<b>18,730,312,535</b>	<b>2,041,283,226</b>	<b>2,176,160</b>	<b>5,565,414,800</b>	<b>63,448,479,110</b>

Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin dijelaskan dalam Tabel 26.

Tabel 26  
Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin  
Per 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Peralatan dan Mesin	Pengurangan					Total
		Penghentian	Reklasifikasi Keluar	Transfer Keluar	Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	Koreksi Pencatatan	
1	Alat Besar	-	-	-	-	-	-
2	Alat Angkutan	(1.588.500.000)	-	-	(102.805.000)	-	(1.691.305.000)
3	Alat Bengkel dan Alat	-	-	-	-	-	-
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	(977.967.604)	(6.930.000)	-	-	-	(984.897.604)
5	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	-	(78.650.000)	-	-	(5.244.214.800)	(5.322.864.800)
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
7	Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-
8	Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-
9	Komputer	(7.074.892.383)	(18.574.807.240)	(2.041.283.226)	-	-	(27.690.982.849)
10	Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	-
11	Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-
12	Peralatan Olah Raga	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(9.641.359.987)</b>	<b>(18.660.387.240)</b>	<b>(2.041.283.226)</b>	<b>(102.805.000)</b>	<b>(5.244.214.800)</b>	<b>(35.690.050.253)</b>



### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 yaitu sebesar Rp226.403.549.867 dan Rp224.201.982.974.

Gedung dan Bangunan PPATK per 31 Desember 2020, terdiri dari:

1. Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikelola oleh Satker 453374 sebesar Rp156.230.612.773, yaitu:
  - a. Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung PPATK di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat dengan luas bangunan 16.630 m<sup>2</sup> senilai Rp128.158.288.773.
  - b. Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung Arsip PPATK (Ciloto) di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan luas bangunan 2,200 m<sup>2</sup> senilai Rp28.072.324.000.
2. Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikelola oleh Satker 417654 sebesar Rp70.172.937.094, yaitu:
  - a. Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung Pusdiklat APUPPT (Cimanggis) di Jl. Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dengan luas bangunan 13.183 m<sup>2</sup> senilai Rp68.340.909.114.
  - b. Bangunan seluas 122 m<sup>2</sup> berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 86 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A5, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp258.982.240. Bangunan tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 9 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014.
  - c. Bangunan seluas 58 m<sup>2</sup> berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A9, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp346.685.440. Bangunan tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 02 tanggal 16 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014.
  - d. Bangunan berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) yang diperoleh berdasarkan BAST No. BAST-053B.09/PL.02/IX/2019 tanggal 9 September 2019) sebesar Rp285.424.800.
  - e. Bangunan berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) yang diperoleh berdasarkan BAST No. BAST-061B.09/PL.02/IX/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.624.200.



**C.2.3 Gedung dan Bangunan (lanjutan)**

- f. Bangunan berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) yang diperoleh berdasarkan BAST No. BAST-062B.09/PL.02/IX/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp226.311.300.
- g. Gedung dan Bangunan berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp275.000.000. Gedung dan Bangunan tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Perj-056/PL.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan BAST Nomor BAST-056.12/PL.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
- h. Gedung dan Bangunan berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp294.000.000. Gedung dan Bangunan tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Perj-057/PL.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan BAST Nomor BAST-057.12/PL.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.664.385.012.

Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dijelaskan dalam Tabel 27.

Tabel 27  
Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan  
Per 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>224.201.982.974</b>
Gedung Kantor (Lokasi Jakarta Pusat)	126.610.846.780
Gedung Arsip (Lokasi Cianjur Jawa Barat)	28.072.324.000
Gedung Pusdiklat APUPPT (Lokasi Depok Jawa Barat)	69.518.812.194
Pagar Permanen	
<i>Mutasi tambah tahun 2020:</i>	
Pengadaan Gedung dan Bangunan Lokasi Puri Cimanggis Permai No A12 Jl. Raya Tapos No 82 Depok	275.000.000
Pengadaan Gedung dan Bangunan Lokasi Puri Cimanggis Permai No A6 Jl. Raya Tapos No 82 Depok	195.000.000
Pengembangan nilai Aset	99.000.000
Pengembangan Melalui KDP	1.936.166.893
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>2.505.166.893</b>
<i>Mutasi kurang tahun 2020:</i>	
Koreksi Pencatatan Nilai	(303.600.000)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(303.600.000)</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>2.201.566.893</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>226.403.549.867</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(18.664.385.012)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>207.739.164.855</b>





Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp235.602.000

#### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp235.602.000. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp64.799.748 dengan rincian mutasi dijelaskan dalam Tabel 28.

Tabel 28  
Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Per 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>235.602.000</b>
<i>Mutasi tambah tahun 2020:</i>	
· Realisasi Belanja Modal Jaringan	-
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>-</b>
<i>Mutasi kurang tahun 2020:</i>	
· Revaluasi Jalan Jembatan dan Bangunan Air	-
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>-</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>-</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>235.602.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(75.599.706)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>160.002.294</b>

Aset Tetap Lainnya  
Rp463.185.968

#### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 yaitu sebesar Rp463.185.968 dan Rp382.506.987 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam Aset Tetap Lainnya antara lain buku perpustakaan dan benda seni. Rincian mutasi Aset Tetap lainnya dijelaskan dalam Tabel 29.

Tabel 29  
Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya  
Per 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>382.506.987</b>
<i>Mutasi tambah tahun 2020:</i>	
· Realisasi Belanja Modal Lainnya	80.678.981
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>80.678.981</b>
<i>Mutasi kurang tahun 2020:</i>	
· Revaluasi Aset Lainnya	-
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>-</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>80.678.981</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>463.185.968</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(27.406.250)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>435.779.718</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Rp132.942.651.633

#### C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp132.942.651.633 dan Rp116.051.858.306.



### C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (lanjutan)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang dijelaskan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dijelaskan dalam Tabel 30.

Tabel 30  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Per 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai per 31 Desember 2020	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2020
1	Tanah	235.129.558.040	-	235.129.558.040
2	Peralatan dan Mesin	174.237.300.592	(114.175.260.665)	60.062.039.927
3	Gedung dan Bangunan	226.403.549.867	(18.664.385.012)	207.739.164.855
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.602.000	(75.599.706)	160.002.294
5	Aset Tetap Lainnya	463.185.968	(27.406.250)	435.779.718
<b>Jumlah</b>		<b>636.469.196.467</b>	<b>(132.942.651.633)</b>	<b>503.526.544.834</b>

Aset Lainnya  
Rp15.617.809.853

### C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp15.617.809.853 dan Rp17.425.093.324 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap, berupa *software* ataupun aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya untuk operasional pemerintah. Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan dijelaskan dalam Tabel 31.

Tabel 31  
Rincian Aset Lainnya  
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	34.496.338.499	37.044.447.353	(2.548.108.854)	(6,88)
2	Aset Lain-Lain	18.535.412.879	4.336.379.891	14.199.032.988	327,44
<b>Jumlah</b>		<b>53.031.751.378</b>	<b>41.380.827.244</b>	<b>11.650.924.134</b>	<b>28,16</b>
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya		(37.413.941.525)	(23.955.733.920)	(13.458.207.605)	56,18
<b>Aset Lainnya</b>		<b>15.617.809.853</b>	<b>17.425.093.324</b>	<b>(1.807.283.471)</b>	<b>(10,37)</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp34.496.338.499

#### C.3.1 Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Pada PPATK aset tersebut berupa *software* maupun anti virus komputer untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp34.496.338.499 dan Rp37.044.447.353.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dijelaskan dalam Tabel 32.



## C.3.1 Aset Tak Berwujud (ATB) - lanjutan

Tabel 32  
Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud  
Per 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>37.044.447.353</b>
<b>Mutasi tambah tahun 2020:</b>	
Realisasi Belanja Modal Lainnya	4.378.665.280
Reklasifikasi	268.829.001
Pembatalan Penghapusan	928.571.100
Hibah (Masuk)	217.895.262
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>5.793.960.643</b>
<b>Mutasi kurang tahun 2020:</b>	
Reklasifikasi Keluar	(69.925.295)
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(8.272.144.202)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(8.342.069.497)</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>(2.548.108.854)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>34.496.338.499</b>
Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2020	(20.240.518.854)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>14.255.819.645</b>

Penambahan ATB yang berasal dari Belanja Modal Lainnya, antara lain untuk pengadaan *software* sistem operasi dan keamanan jaringan di PPATK, pembelian lisensi baru, dan pembelian Aset Tak Berwujud Lainnya.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.240.518.854.

Aset Lain-lain  
Rp18.535.412.879

## C.3.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 yaitu sebesar Rp18.535.412.879 dan Rp4.336.379.891. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan dan dalam proses penghapusan.

Aset Lain-lain yang terdapat di PPATK per 31 Desember 2020 terdiri dari:

1. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp8.052.859.987.
2. Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp10.482.552.892.

Akumulasi  
Penyusutan/Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp37.413.941.525

## C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp37.413.941.525 dan Rp23.955.733.920.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dijelaskan dalam Tabel 33.



**C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (lanjutan)**

Tabel 33

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
Per 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

No	Aset Lain-Lain	Nilai per 31 Desember 2020	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku per 31 Desember 2020
1	Aset Tak Berwujud	34.496.338.499	(20.240.518.854)	14.255.819.645
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	18.535.412.879	(17.173.422.671)	1.361.990.208
<b>Jumlah</b>		<b>53.031.751.378</b>	<b>(37.413.941.525)</b>	<b>15.617.809.853</b>

**KEWAJIBAN**

Kewajiban Jangka  
Pendek Rp396.379.135

**C.4. Kewajiban Jangka Pendek**

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp396.379.135 dan Rp845.274.066.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 yaitu sebesar 53,11%. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 34.

Tabel 34

Rincian Kewajiban Jangka Pendek  
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	388.947.555	810.628.363	(421.680.808)	(52,02)
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	2.176.160	-	2.176.160	-
3	Pendapatan Diterima Dimuka	5.255.420	17.868.416	(12.612.996)	(70,59)
4	Uang Muka dari KPPN	-	16.777.287	(16.777.287)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>396.379.135</b>	<b>845.274.066</b>	<b>(448.894.931)</b>	<b>(53,11)</b>

Utang Kepada Pihak  
Ketiga Rp388.947.555

**C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp388.947.555 dan Rp 810.628.363.

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 terdiri dari:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp113.886.509, yaitu untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan pegawai tahun 2020 di Satker 417654 dan Satker 453374.



#### C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga (lanjutan)

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp275.061.046, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp102.443.538 di Satker 417654.
  - b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp172.617.508 di Satker 453374.

*Utang Yang Belum Ditagihkan Rp2.176.160*

#### C.4.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan utang akrual pada saat pengakuan pencatatan BAST dari pihak ketiga. Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp2.176.160 dan Rp0.

Utang yang Belum Ditagihkan sebesar Rp2.176.160 terjadi di Satker 453374.

*Pendapatan Diterima di Muka Rp5.255.420*

#### C.4.3 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, tetapi barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp5.255.420 dan Rp17.868.416.

Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp5.255.420 merupakan jasa sewa yang masih harus diberikan PPATK kepada BRI atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berdasarkan kontrak sewa lahan untuk penempatan mesin ATM dengan Perjanjian Sewa antara PPATK dengan BRI Cab. Veteran Jakarta untuk masa sewa 1 Juni 2019 s.d. 31 Mei 2021 (dua Tahun) sebesar Rp25.226.000 dengan nomor referensi NTPN. 6397A48VU0GKKJ1S dan nomor kontrak PERJ-01/PL.03.03/PPATK/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dengan masa sewa 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2021.

*Uang Muka KPPN Rp0*

#### C.4.4 Uang Muka KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0 dan Rp16.777.287.

### EKUITAS

*Ekuitas Rp524.422.213.711*

#### C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp524.422.213.711 dan Rp509.859.880.893. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp44.804.056

**D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp44.804.056 dan Rp53.673.413.

Perbandingan Rincian Pendapatan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 35.

Tabel 35  
Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
<b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>				
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	12.612.996	11.185.914	1.427.082	12,76
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	32.191.060	42.487.499	(10.296.439)	(24,23)
<b>Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya</b>	<b>44.804.056</b>	<b>53.673.413</b>	<b>(8.869.357)</b>	<b>(16,52)</b>

Beban Pegawai  
Rp111.335.368.412

**D.2. Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp111.335.368.412 dan Rp82.237.823.707.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 36.

Tabel 36  
Perbandingan Rincian Beban Pegawai  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	13.495.934.780	12.584.097.710	911.837.070	7,25
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	184.093	175.376	8.717	4,97
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	761.686.660	692.059.648	69.627.012	10,06
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	206.981.766	187.481.672	19.500.094	10,40
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	972.250.000	1.004.650.000	(32.400.000)	(3,23)
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	273.331.000	140.790.000	132.541.000	94,14
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	41.304.521	49.199.598	(7.895.077)	(16,05)
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	628.533.180	588.267.660	40.265.520	6,84
511129	Beban Uang Makan PNS	2.532.583.000	2.124.229.000	408.354.000	19,22
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	655.900.000	699.090.000	(43.190.000)	(6,18)
511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	1.821.000.000	2.290.700.400	(469.700.400)	(20,50)
511324	Beban Tunjangan PPh Pejabat Negara	387.325.005	531.760.120	(144.435.115)	(27,16)
512111	Beban Uang Honor Tetap	5.689.116.587	11.017.518.210	(5.328.401.623)	(48,36)
512211	Beban Uang Lembur	116.880.000	220.013.000	(103.133.000)	(46,88)
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	83.752.357.820	50.107.791.313	33.644.566.507	67,14
	<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>111.335.368.412</b>	<b>82.237.823.707</b>	<b>29.097.544.705</b>	<b>35,38</b>



## D.2. Beban Pegawai (lanjutan)

Terdapat kenaikan Realisasi Beban Pegawai Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 35,38% dibanding Realisasi Beban Pegawai Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019. Kenaikan Beban Pegawai, antara lain disebabkan:

1. Terdapat kenaikan Beban Gaji Pokok PNS, antara lain karena Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direkrut pada tahun 2019 sudah diangkat menjadi PNS pada tahun 2020, kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan pegawai dipekerjakan yang berstatus CPNS dan PNS, pembayaran Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketigabelas.
2. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan Suami/Istri PNS antara lain karena penambahan pegawai dipekerjakan dan perubahan status pernikahan PNS/CPNS.
3. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan Anak PNS, antara lain karena penambahan pegawai dipekerjakan dan penambahan tanggungan PNS/CPNS.
4. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan Fungsional PNS karena penambahan jumlah pegawai yang menerima tunjangan fungsional untuk Pranata Komputer, Pranata Humas, dan Auditor.
5. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan Beras PNS, antara lain karena penambahan pegawai dipekerjakan dan penambahan tanggungan PNS/CPNS.
6. Terdapat kenaikan Beban Uang Makan PNS karena kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan pegawai dipekerjakan yang berstatus CPNS dan PNS dan penurunan perjalanan dinas karena pemberlakuan PSBB akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pegawai lebih sering bekerja baik WFH maupun WFO.
7. Terdapat kenaikan Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) karena Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direkrut pada tahun 2019 sudah diangkat menjadi PNS pada tahun 2020, kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan pegawai dipekerjakan yang berstatus CPNS dan PNS, serta terdapat kenaikan besaran Tunjangan Khusus/Kegiatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan PPATK dan Peraturan PPATK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan PPATK.

Penurunan Beban Pegawai, antara lain disebabkan:

1. Penurunan Belanja Tunjangan Struktural PNS karena terdapat pejabat struktural yang beralih menjadi pejabat fungsional.
2. Penurunan Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara karena kekosongan Jabatan Wakil Kepala PPATK sejak Juni 2020.
3. Penurunan Beban Uang Honor Tetap karena sejak Januari 2020 pembayaran yang direalisasikan akun tersebut hanya digunakan untuk membayar honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diangkat menjadi pegawai dalam



### D.2. Beban Pegawai (lanjutan)

rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja di Satker 417654 dan 453374. Untuk honor PPNPN yang dipekerjakan secara kontraktual sebagai tenaga pengamanan, pramubakti dan pengemudi dibebankan pada akun Beban Keperluan Perkantoran (521111).

4. Penurunan Beban Uang Lembur karena berdasarkan Surat Edaran Wakil Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Lingkungan PPATK sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2020 ditetapkan bahwa seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work From Home-WFH) dari tanggal 16 Maret sampai dengan 4 Juni 2020. Selanjutnya, diterapkan sistem kerja WFH dan *Work From Office* (WFO) selama masa pandemi di tahun 2020.

Beban Persediaan  
Rp2.704.496.163

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.704.496.163 dan Rp3.750.619.452.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dan dijelaskan dalam Tabel 37.

Tabel 37  
Perbandingan Rincian Beban Persediaan  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	2.647.690.784	3.612.184.857	(964.494.073)	(26,70)
593121	Beban Persediaan pita cukai meterai dan leges	-	8.592.000	(8.592.000)	(100,00)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	4.875.863	9.708.325	(4.832.462)	(49,78)
593149	Beban Persediaan Lainnya	51.929.516	120.134.270	(68.204.754)	(56,77)
<b>Total Beban Persediaan</b>		<b>2.704.496.163</b>	<b>3.750.619.452</b>	<b>(1.046.123.289)</b>	<b>(27,89)</b>

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, terdiri dari:

- a. Beban Persediaan Konsumsi, antara lain barang cetakan, alat tulis kantor, dan perlengkapan pemeliharaan.
- b. Beban Persediaan Bahan Baku, yaitu beban atas penggunaan bahan bakar solar untuk pemeliharaan peralatan dan mesin (penggunaan genset).
- c. Beban Persediaan Lainnya, merupakan beban atas penggunaan obat-obatan di klinik dokter umum dan dokter gigi.





**D.4. Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp24.389.656.981 dan Rp45.973.335.150. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, diatur bahwa realisasi belanja yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di PPATK dibebankan pada akun sebagai berikut:

3. Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp714.121.036, antara lain digunakan untuk:
  - a. Vitamin penambah daya tahan tubuh.
  - b. Pengadaan obat-obatan dan bahan-bahan Klinik Gigi dan Klinik Umum dalam rangka penanganan Covid-19.
  - c. Bahan Disinfektan.
  - d. Pengadaan Masker/Hand Sanitizer.
  - e. Langganan Aplikasi Zoom untuk rapat secara daring.
  - f. Paket data dalam rangka rapat secara daring selama WFH.
4. Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp130.614.686, antara lain untuk konsumsi pegawai yang melaksanakan kegiatan piket di kantor pada masa awal pandemi.
5. Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 sudah direalisasikan sebesar Rp1.155.385.518, antara lain untuk menerapkan prosedur pemeriksaan kesehatan pegawai untuk pelaksanaan tes Covid-19 dan jasa penyemprotan disinfektan Gedung PPATK dan Pusdiklat APUPPT.

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 38.

Tabel 38  
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	7.426.823.638	854.494.648	6.572.328.990	769,15
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	9.956.700	208.653.501	(198.696.801)	(95,23)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	323.378.973	205.418.344	117.960.629	57,42
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	33.200.000	31.150.000	2.050.000	6,58
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	773.118.865	1.101.646.038	(328.527.173)	(29,82)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	714.121.036	-	714.121.036	-





## D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
521211	Beban Bahan	839.903.430	3.329.643.082	(2.489.739.652)	(74,77)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	333.190.000	399.400.000	(66.210.000)	(16,58)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	9.070.406.482	11.271.430.753	(2.201.024.271)	(19,53)
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	130.614.686	-	130.614.686	-
522111	Beban Langganan Listrik	3.260.724.291	3.774.227.366	(513.503.075)	(13,61)
522112	Beban Langganan Telepon	75.600.126	104.907.697	(29.307.571)	(27,94)
522113	Beban Langganan Air	16.282.186	9.221.595	7.060.591	76,57
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.028.529.626	1.060.380.200	(31.850.574)	(3,00)
522131	Beban Jasa Konsultan	2.337.915.141	997.249.000	1.340.666.141	134,44
522141	Beban Sewa	867.264.310	905.492.370	(38.228.060)	(4,22)
522151	Beban Jasa Profesi	2.812.275.000	1.448.320.000	1.363.955.000	94,17
522191	Beban Jasa Lainnya	19.799.688.300	20.101.796.356	(302.108.056)	(1,50)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	1.155.385.518	-	1.155.385.518	-
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	102.805.000	169.904.200	(67.099.200)	-
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>		<b>51.111.183.308</b>	<b>45.973.335.150</b>	<b>5.137.848.158</b>	<b>11,18</b>

Kenaikan Beban Barang dan Jasa yang signifikan, antara lain terjadi pada:

1. Kenaikan Beban Keperluan Perkantoran karena terdapat pembayaran honor PPNPN yang dipekerjakan secara kontraktual sebagai tenaga pengamanan, pramubakti dan pengemudi, dan pengadaan tes kesehatan bagi pegawai.
2. Kenaikan Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat karena terdapat peningkatan pengiriman surat dinas terkait penundaan kegiatan diklat secara klasikal di masa awal pandemi Covid-19, pemberitahuan diklat secara jarak jauh/secara virtual, pengiriman sertifikat dan souvenir ke peserta pelatihan, serta pengiriman dokumen pihak eksternal.
3. Kenaikan Beban Honor Operasional Satuan Kerja terdapat pembebanan pembayaran honor bendahara pengeluaran di Satker 453374 dan Satker 417654.
4. Kenaikan Beban Barang Operasional Lainnya, karena terdapat pembayaran bantuan operasional untuk tenaga pengamanan, pengemudi, protokol, ajudan, tenaga caraka, tenaga pengurus visa/paspor dinas, dan petugas penghubung pengurusan dokumen anggaran dan keuangan di Satker 453374 dan 417654.
5. Kenaikan Beban Langganan Air karena pemasangan fasilitas untuk cuci tangan sebelum memasuki gedung kantor PPATK.
6. Kenaikan Beban Jasa Konsultan karena terdapat konsultasi plumbing dan perencanaan konstruksi *relayout* di Satker 453374.
7. Kenaikan Beban Jasa Profesi karena pembayaran honorarium untuk narasumber pelatihan dan seminar yang diadakan secara daring oleh Satker 417654 dan 453374.

Penurunan Beban Barang dan Jasa yang signifikan, antara lain terjadi pada:

1. Penurunan Beban Penambah Daya Tahan Tubuh karena berdasarkan Surat Edaran Wakil Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Lingkungan





#### D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)

PPATK sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2020 ditetapkan bahwa seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work From Home-WFH) dari tanggal 16 Maret sampai dengan 4 Juni 2020.

2. Penurunan Beban Bahan karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan koordinasi dilaksanakan melalui surat elektronik dan rapat secara daring, sehingga frekuensi rapat koordinasi dalam rangka kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor, kegiatan pemeriksaan dan audit kepada Pihak Pelapor serta kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK secara tatap muka langsung menjadi berkurang.
3. Penurunan Beban Honor Output Kegiatan karena terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan sebagai akibat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di beberapa daerah yang menjadi pusat penyebaran kasus Covid-19.
4. Penurunan Beban Barang Non Operasional Lainnya karena terdapat penundaan pengadaan belanja barang akibat pandemi Covid-19.
5. Penurunan Beban Langganan Listrik karena terdapat penurunan penggunaan listrik di Satker 417654 dan 453374 karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan koordinasi dilaksanakan melalui surat elektronik dan rapat secara daring.
6. Penurunan Beban Langganan Telepon karena pemberlakuan sistem kerja WFH, sehingga koordinasi dilaksanakan melalui surat elektronik dan rapat secara daring
7. Penurunan Beban Jasa Lainnya karena terdapat penurunan realisasi Belanja Jasa Lainnya. Namun, untuk kegiatan hibah bentuk jasa yang sudah diserahterimakan dan disahan mengalami kenaikan yang akan dijelaskan lebih detail pada bagian **F.2. Kegiatan Yang Dibiayai dari Hibah.**

*Beban Pemeliharaan  
Rp4.436.023.511*

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp4.436.023.511 dan Rp5.868.885.990. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Persediaan Suku Cadang, dan Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan.

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 39.



**D.5 Beban Pemeliharaan (lanjutan)**

Tabel 39  
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.277.125.414	1.960.268.353	(683.142.939)	(34,85)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.165.651.345	1.446.710.609	(281.059.264)	(19,43)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.787.326.560	2.050.014.051	(262.687.491)	(12,81)
593113	Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	131.964.513	172.200.868	(40.236.355)	(23,37)
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	73.955.679	126.042.859	(52.087.180)	(41,32)
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	113.649.250	(113.649.250)	(100,00)
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>		<b>4.436.023.511</b>	<b>5.868.885.990</b>	<b>(1.432.862.479)</b>	<b>(24,41)</b>

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 24,41% yang disebabkan oleh penurunan realisasi belanja pemeliharaan di Satker 417654 dan 453374.

Beban Perjalanan Dinas  
Rp9.920.805.095

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp9.920.805.095 dan Rp28.031.058.326. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 40.

Tabel 40  
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
524111	Beban Perjalanan Biasa	4.859.561.101	12.906.085.381	(8.046.524.280)	(62,35)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	234.846.820	605.626.003	(370.779.183)	(61,22)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.423.672.064	4.591.719.800	(3.168.047.736)	(68,99)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.754.040.553	3.882.533.497	(1.128.492.944)	(29,07)
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	648.684.557	6.045.093.645	(5.396.409.088)	(89,27)
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>		<b>9.920.805.095</b>	<b>28.031.058.326</b>	<b>(18.110.253.231)</b>	<b>(64,61)</b>

Terdapat penurunan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 64,61% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Penurunan Beban Perjalanan Dinas, disebabkan oleh:



### D.6 Beban Perjalanan Dinas (lanjutan)

1. Penurunan Beban Perjalanan Biasa karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan pemberlakuan PSBB, sehingga kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK dan koordinasi eksternal dilakukan melalui surat elektronik dan rapat secara daring.
2. Penurunan Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan pemberlakuan PSBB, sehingga kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK dan koordinasi eksternal dilakukan melalui surat elektronik dan rapat secara daring.
3. Penurunan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan pemberlakuan PSBB, sehingga kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK dan koordinasi eksternal dilakukan melalui surat elektronik dan rapat secara daring.
4. Penurunan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan pemberlakuan PSBB, sehingga kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK dan koordinasi eksternal dilakukan melalui surat elektronik dan rapat secara daring.
5. Penurunan Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri karena seluruh pegawai PPATK ditugaskan untuk WFH dan pemberlakuan lockdown di luar negeri, serta terdapat penundaan kegiatan dari pihak penyelenggara di luar negeri.

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp32.568.881.851

### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp32.568.881.851 dan Rp25.454.613.029.

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 41.

Tabel 41  
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	21.466.537.545	15.707.763.421	5.758.774.124	36,66
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.686.614.396	4.975.333.581	(288.719.185)	(5,80)
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18.745.250	18.745.250	-	-



**D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi (lanjutan)**

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
591313	Beban Penyusutan Jaringan	2.854.666	2.854.666	-	-
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.853.750	-	4.853.750	-
592115	Beban Amortisasi Software	6.101.079.289	4.748.330.681	1.352.748.608	28,49
592116	Beban Amortisasi Lisensi	8.120.860	1.585.430	6.535.430	412,22
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	280.076.095	-	280.076.095	-
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>		<b>32.568.881.851</b>	<b>25.454.613.029</b>	<b>7.114.268.822</b>	<b>27,95</b>

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar  
Rp448.499.776

**D.8 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar**

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pelepasan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp448.499.776 dan Rp70.922.222. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp448.499.776 yang merupakan hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan di Satker 453374, antara lain:

1. Kendaraan Roda Empat sebesar Rp72.621.000 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 111/28/2020, Bukti Penerimaan Negara Nomor NTPN 181880N9UV5HOHPE tanggal 27 April 2020.
2. BMN berupa puing sebesar Rp15.777.777 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 119/28/2020, Bukti Penerimaan Negara Nomor NTPN D7BF61JNEPQG2UTR tanggal 13 Mei 2020.
3. Kendaraan Roda Empat sebesar Rp89.514.999 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 155/28/2020, Bukti Penerimaan Negara Nomor NTPN 2DD7E3CIEF4SNUFH tanggal 1 Juli 2020.
4. Kendaraan Roda Empat sebesar Rp136.361.000 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 290/28/2020, Bukti Penerimaan Negara Nomor NTPN 1059861QTV5I1FRS tanggal 20 Oktober 2020.
5. Kendaraan Roda Empat sebesar Rp134.225.000 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 358/28/2020, Bukti Penerimaan Negara Nomor NTPN 43C9D3CIEFJR7V9T tanggal 3 Desember 2020

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp885.000

**D.9 Beban Pelepasan Aset Non Lancar**

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang timbul dari Pelepasan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp885.000 dan Rp2.010.000.



*Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp201.949.308*

#### **D.10 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp201.949.308 dan Rp616.113.990.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020, sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya di Satker 453374 sebesar Rp156.327.644, terdiri dari:
  - a. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.352.392 yang berasal dari pihak ketiga sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019.
  - b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp70.779.810 yang berasal dari pihak ketiga sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019.
  - c. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp83.047.302.
  - d. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi sebesar Rp1.148.140.
2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya di Satker 417654 sebesar Rp45.621.664, terdiri dari:
  - a. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp19.730.420.
  - b. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp25.891.244.

*Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp61.629.939*

#### **D.11 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp61.629.939 dan Rp178.925.873.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp61.629.939 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020, sebagai berikut:

1. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya di Satker 453374 sebesar Rp49.908.774, terdiri dari:
  - a. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp341.940 karena terdapat pembayaran kepada pihak ketiga dalam mata uang asing.
  - b. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Rp49.566.834.
2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya di Satker 417654 sebesar Rp11.721.165 yang seluruhnya berasal dari Beban Penyesuaian Nilai Persediaan.





Surplus (Defisit) dari Laporan Operasional (Rp211.444.020.139)

## D.12 Surplus (Defisit) Laporan Operasional (LO)

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Jumlah Surplus (Defisit) Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp211.444.020.139) dan (Rp190.756.561.902).

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp509.859.880.893

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp509.859.880.893 dan Rp252.540.258.562.

Surplus(defisit) LO (Rp211.444.020.139)

### E.2. Surplus(Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah defisit sebesar (Rp211.444.020.139) dan (Rp190.756.561.902).

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas (Rp296.305.181)

### E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp296.305.181) dan Rp234.878.663.778.

Transaksi Antar Entitas Rp226.302.658.138

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain ditambah pengesahan hibah langsung.

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp226.302.658.138 dan Rp213.197.520.455.

Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dijelaskan dalam Tabel 42.

Tabel 42  
Rincian Transaksi Antar Entitas  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	208.269.277.734	195.685.169.459	12.584.108.275	6,43
313121	Diterima dari Entitas Lain	(572.553.458)	(673.487.690)	100.934.232	(14,99)



**E.4. Transaksi Antar Entitas (lanjutan)**

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
313211	Transfer Keluar	-	(7.524.970)	7.524.970	(100,00)
313221	Transfer Masuk	-	-	-	-
391131	Pengesahan Hibah Langsung	18.605.933.862	18.193.363.656	412.570.206	2,27
<b>Total Transaksi Antar Entitas</b>		<b>226.302.658.138</b>	<b>213.197.520.455</b>	<b>13.105.137.683</b>	<b>6,15</b>

*Ditagihkan ke Entitas Lain Rp208.269.277.734*

**E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain**

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja PPATK yang melibatkan kas negara/Bendahara Umum Negara (BUN). Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp208.269.277.734 dan Rp195.685.169.459.

*Diterima dari Entitas Lain (Rp572.553.458)*

**E.4.2. Diterima dari Entitas Lain**

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan PPATK yang melibatkan kas negara/Bendahara umum Negara (BUN). Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp572.553.458) dan (Rp673.487.690).

*Transfer Keluar Rp0*

**E.4.3. Transfer Keluar**

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal PPATK. Transfer Keluar yang terjadi di PPATK berupa transfer keluar gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan dan jaringan karena adanya pemisahan catatan BMN di Satker Kantor Pusat dengan Satker Pusdiklat APUPPT. Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp7.524.970.

*Transfer Masuk Rp0*

**E.4.4. Transfer Masuk**

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal PPATK. Transfer Masuk yang terjadi di PPATK berupa transfer masuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan dan jaringan karena adanya pemisahan catatan BMN di Satker Kantor Pusat dengan Satker Pusdiklat APUPPT sebagai upaya pengendalian catatan awal BMN di Satker Pusdiklat APUPPT yang baru mulai beroperasi pada tahun 2018. Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0.

*Pengesahan Hibah Langsung Rp18.605.933.862*

**E.4.5. Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung berupa barang dan jasa yang sudah diterima PPATK dan telah disahkan oleh KPPN Jakarta VI. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp18.605.933.862 dan Rp18.193.363.656.

Hibah langsung yang sudah diserahterimakan dan disahkan sampai dengan 31 Desember 2020 bagian **F.2. Kegiatan Yang Dibiayai dari Hibah.**





Ekuitas Akhir  
Rp524.422.213.711

## E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp524.422.213.711 dan Rp509.859.880.893.

## F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

### F.1. Perubahan Manajemen

Pada 6 Mei 2020, bertempat di Istana Negara, Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, melantik Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode tahun 2020-2021, Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LL.M. Pelantikan tersebut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., dan Menteri Sekretaris Negara, Prof. Dr. Drs. Pratikno, M.Soc.Sc.

Dian Ediana Rae akan mengisi jabatan Kepala PPATK yang kosong selepas wafatnya Kepala PPATK sebelumnya, Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, MSc., pada 14 Maret 2020. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK, yang dilantik untuk masa jabatan tahun 2016 hingga 2021. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK, ditetapkan bahwa Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LL.M sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan 2020-2021, melanjutkan sisa masa jabatan Kepala PPATK yang digantikannya.

### F.2. Kegiatan Yang Dibiayai dari Hibah

#### F.2.1 Kegiatan Yang Dibiayai dari USAID

PPATK menerima hibah dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development/USAID) kepada Pemerintah Indonesia dengan Perjanjian Hibah (*Assistance Agreement*) USAID Nomor 497-AA-030 dan nomor register hibah 2DS44SFA. Kegiatan hibah diberikan melalui program USAID-CEGAH yang dilaksanakan dari 31 Mei 2016 sampai dengan 28 Februari 2020.

Kegiatan di PPATK yang dibiayai dari hibah USAID-CEGAH yang sudah diserahterimakan dan disahkan pada tahun 2020 sebesar USD139,354 atau Rp1.981.892.588, terdiri dari:

1. Hibah Bentuk Barang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 168/USAID-INA/BAST-Goods/DRG tanggal 3 Maret 2020 dan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung (MPHL) Nomor 8704465540639694 tanggal 19 Maret 2020 sebesar USD15,321 atau sebesar Rp217.895.262.
2. Hibah Bentuk Jasa dengan BAST Nomor 106/USAID-INA/BAST-Service/DRG tanggal 3 Maret 2020 dan Persetujuan MPHL Nomor 8701147540639693 tanggal 19 Maret 2020 sebesar USD124,033 atau sebesar Rp1.763.997.326.



### **F.2.2 Kegiatan Yang Dibiayai dari Hibah Pemerintah Australia - PROSPERA**

Hibah dari pemerintah Australia yang dilaksanakan melalui Kegiatan PPATK AUSTRAC Partnership Program (PAPP) sebagai kelanjutan dari Government Partnership Program Phase II (GPF II). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Development (AIECO) atau Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA) pada 4 Desember 2017 dengan periode hibah selama 5 (lima) tahun sejak Maret 2018 s.d. Februari 2023 dan memiliki nomor NPH/Register SA 04.12.2017/23TSV7CA tanggal 4 Desember 2017. Nilai hibah PROSPERA yang diterima PPATK untuk kegiatan selama 5 (lima) tahun sebesar AUD8,368,845.

Kegiatan di PPATK yang dibiayai dari hibah PROSPERA yang sudah diserahterimakan dan disahkan pada tahun 2020 sebesar AUD998,765.4 atau Rp10.754.625.926 dengan BAST No. BAST-1/PL.03.01//XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan MPHL No. 1858A tanggal 31 Desember 2020.

### **F.2.3 Kegiatan Yang Dibiayai dari Hibah Pemerintah Australia - AIPJ**

PPATK menerima hibah dari Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) kepada Pemerintah Indonesia dengan Perjanjian Australia Indonesia Partnership for Justice Phase II (AIPJ) Nomor SA 29.05.2017 dan nomor register hibah 29JPW1VA. Kegiatan hibah dilaksanakan dari 29 Mei 2017 sampai dengan 29 Mei 2022.

Kegiatan yang dibiayai dari hibah AIPJ yang sudah diserahterimakan dan disahkan pada tahun 2020 sebesar AUD486,020.19 atau Rp5.235.064.412 dengan BAST No. BAST No. BAST-2/PL.03.01//XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 dan MPHL No. 1861A tanggal 31 Desember 2020.

### **F.2.4 Kegiatan Yang Dibiayai dari Hibah UNODC**

PPATK menerima hibah dari UNODC yang dilaksanakan melalui Kegiatan UNODC *Country Programme* II dengan periode hibah sampai dengan 31 Desember 2020 dan memiliki nomor register hibah 2JQHG9AA. Kegiatan di PPATK yang dibiayai dari hibah UNODC *Country Programme* II yang sudah diserahterimakan dan disahkan pada tahun 2020 sebesar Rp634.350.936 dengan BAST No. BAST No. BAST-3/PL.03.01//XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan MPHL No. 1859A tanggal 31 Desember 2020.

### **F.3. Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)**

Penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar.



### F.3. Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) - lanjutan

Hal tersebut berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020), ditetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagai berikut:

1. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan; dan
2. Kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, diatur bahwa realisasi belanja yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di PPATK dibebankan pada akun sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 sudah direalisasikan 81,88% atau sebesar Rp714.121.036 dari anggaran sebesar Rp872.160.000 yang digunakan untuk:
  - a. Vitamin penambah daya tahan tubuh.
  - b. Pengadaan obat-obatan dan bahan-bahan Klinik Gigi dan Klinik Umum dalam rangka penanganan Covid-19.
  - c. Bahan Disinfektan.
  - d. Pengadaan Masker/Hand Sanitizer.
  - e. Langganan Aplikasi Zoom untuk rapat secara daring.
  - f. Paket data dalam rangka rapat secara daring selama WFH.
2. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 sudah direalisasikan 71,14% atau sebesar Rp130.614.686 dari anggaran sebesar Rp183.600.000, yaitu untuk konsumsi pegawai yang melaksanakan kegiatan piket di kantor pada masa awal pandemi.



3. Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 sudah direalisasikan 72,22% atau sebesar Rp1.104.985.518 dari anggaran sebesar Rp1.530.047.000 yaitu prosedur pemeriksaan kesehatan pegawai untuk pelaksanaan tes Covid-19 dan jasa penyemprotan disinfektan Gedung PPATK dan Pusdiklat APUPPT.
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19 yang sudah direalisasikan 92,33% atau sebesar Rp130.614.686 dari anggaran sebesar Rp183.600.000 yang digunakan untuk pembelian alat pendeteksi suhu tubuh

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja - Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dalam Tabel 43.

Tabel 43  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja - Penanganan Pandemi COVID-19  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi (Neto)	% Realisasi
<b>Belanja Barang</b>	<b>2.585.807.000</b>	<b>1.949.721.240</b>	<b>75,40</b>
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	872.160.000	714.121.036	81,88
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	183.600.000	130.614.686	71,14
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.530.047.000	1.104.985.518	72,22
<b>Belanja Modal</b>	<b>388.630.000</b>	<b>358.826.811</b>	<b>92,33</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	388.630.000	358.826.811	92,33
<b>Jumlah</b>	<b>2.974.437.000</b>	<b>2.308.548.051</b>	<b>77,61</b>

#### F.4. Penilaian Kembali Aset Tetap

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dimanfaatkan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.





#### F.4. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang Ekuitas pada Laporan Keuangan.

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 dan LHIP-0050/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 6 Oktober 2017, telah dilakukan penilaian kembali atas Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam face Neraca PPATK per 31 Desember 2019, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3383/PB/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Koreksi Data Revaluasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 dan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Penyampaian Nilai Koreksi atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017 dinyatakan bahwa hasil revaluasi BMN yang telah disajikan dalam face LKKL Tahun 2017 perlu dilakukan koreksi melalui Satker Konsolidasi, sehingga dibentuk Satker Konsolidasi PPATK, sebagai berikut:

1. Kode BA 078 – PPATK
2. Kode Unit 55 - Konsolidasian PPATK
3. Kode Satker 555078 - Konsolidasian PPATK
4. Kode KPPN 555 – KPPN Konsolidasian
5. Kode Jenis Kewenangan – Kantor Pusat (KP)
6. Kode Wilayah 0199 – Kantor Pusat

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan PPATK Tahun 2017 yang Dimasukkan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (Audited) Nomor NKF-078/13.a/R/PB.6/2018 tanggal 20 April 2018 dilakukan koreksi yang dijelaskan dalam Tabel 44, Tabel 45, dan Tabel 46.



## F.4. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

Tabel 44  
Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Neraca  
Per 31 Desember 2017  
(Dalam Rupiah)

Akun	Unaudited Tahun 2017	Koreksi		Asersi Final Tahun 2017
		Debet	Kredit	
Tanah	325.328.697.000	-	244.350.697.000	80.978.000.000
Gedung dan Bangunan	212.636.175.897	-	66.550.684.743	146.085.491.154
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	191.178.000	437.108.198	-	628.286.198
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.809.131.946)	1.002.053.446	14.119.900.881	(16.926.979.381)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(11.981.133)	-	287.901.608	(299.882.741)
<b>Jumlah</b>	<b>534.334.937.818</b>	<b>1.439.161.644</b>	<b>325.309.184.232</b>	<b>210.464.915.230</b>

Tabel 45  
Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Operasional  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017  
(Dalam Rupiah)

Akun	Unaudited Tahun 2017	Koreksi		Asersi Final Tahun 2017
		Debet	Kredit	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	20.071.594.176	17.453.510	1.002.053.446	19.086.994.240
<b>Jumlah</b>	<b>20.071.594.176</b>	<b>17.453.510</b>	<b>1.002.053.446</b>	<b>19.086.994.240</b>

Tabel 46  
Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Perubahan Ekuitas  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017  
(Dalam Rupiah)

Akun	Unaudited Tahun 2017	Koreksi		Asersi Final Tahun 2017
		Debet	Kredit	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	324.855.497.524	324.855.497.524	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>324.855.497.524</b>	<b>324.855.497.524</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), Pemerintah memutuskan Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Penilaian kembali BMN akan disajikan setelah perbaikan dan hasilnya diterima oleh BPK.

Selanjutnya, sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018 yang dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited) Nomor NKF-078/PB.6/2019 tanggal 28 Maret 2019, telah disepakati bahwa nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan Keuangan PPATK tahun 2018 (audited) tidak menggunakan angka hasil penilaian kembali aset tetap.



**F.4. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN, terdapat koreksi atas jurnal penyesuaian pada Satker Konsolidasi yang menyebabkan perubahan pada Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018 Audited.

Jurnal Koreksi yang dilakukan di Satker Konsolidasi PPATK dijelaskan dalam Tabel 47.

Tabel 47  
Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi PPATK  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018  
(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.002.053.447)	-
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	(1.002.053.447)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.002.053.446	-
391116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	-	1.002.053.446
	<i>(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>		
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	(16.578.510)	-
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	(16.578.510)
391116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	16.578.510	-
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	16.578.510
	<i>(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>		
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.002.021.059)	-
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	(1.002.021.059)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.002.053.446	-
391116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	-	1.002.053.446
	<i>(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>		
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	(16.578.510)	-
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	(16.578.510)
391116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	16.578.510	-
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	16.578.510
	<i>(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>		
131111	Tanah	(14.765.778.000)	-
313211	TransferKeluar	-	(14.765.778.000)
	<i>(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>		
313211	TransferKeluar	(4.480.600)	-
133111	GedungdanBangunan	-	(4.480.600)
	<i>(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>		
313221	TransferMasuk	(14.765.778.000)	-
131111	Tanah	-	(14.765.778.000)





## F.4. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
133111	GedungdanBangunan	(4,480,600)	-
313221	TransferMasuk	-	(4,480,600)
	<i>(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>		
313221	TransferMasuk	(7,524,970)	-
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	(7,524,970)
	<i>(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>		
	<b>TOTAL</b>	<b>(29,548,009,784)</b>	<b>(29,548,009,784)</b>

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 hal Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 Unaudited, sehingga nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 Unaudited merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2018.

Laporan Keuangan PPATK (BA078) Tahun 2019 Unaudited belum menyajikan nilai Aset Tetap sebagaimana LHIP tanggal 25 November 2019 karena sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 terdapat kendala teknis dalam proses pengolahan data BMN di Sistem Informasi Manajemen Aset negara (SIMAN) dan belum terdapat petunjuk teknis yang jelas mengenai jurnal koreksi hasil inventarisasi dan penilaian bagi Satker yang sudah mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Barang Milik Negara (BMN) Nomor LHIP-356 s.d. LHIP-358/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019 dan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Revaluasi BMN Nomor NKF Revaluasi-078/32/KN.2/2020 tanggal 28 April 2020, Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 *Audited* dan Laporan Keuangan PPATK Tahun 2020 merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2019.

Jurnal Koreksi yang dilakukan di Satker Konsolidasi PPATK untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dijelaskan dalam Tabel 48.



## F.4. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

Tabel 48  
Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi PPATK  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan
		<b>Jurnal Balik untuk mencatat (Take-In) hasil Revaluasi Aset Tetap</b>			<b>Jurnal Balik</b>
1	133111	Gedung dan Bangunan	66.550.684.743		SAIBA - JU
	391114	Revaluasi Aset Tetap		66.550.684.743	
		<i>Jurnal Balik untuk mencatat (take-in) Nilai Gedung dan Bangunan setelah Revaluasi Gedung &amp; Bangunan periode 2017-2018. Lihat Jurnal umum Satker Konsolidasi PPATK JU 001 tgl 31-12-2018.</i>			
2	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.119.900.881		SAIBA - JU
	391114	Revaluasi Aset Tetap		14.119.900.881	
		<i>Jurnal Balik untuk mencatat (take-in) Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan setelah Revaluasi Gedung &amp; Bangunan. Lihat Jurnal umum Satker Konsolidasi PPATK JU 002 tgl 31-12-2018.</i>			
3	391114	Revaluasi Aset Tetap	437.108.198		SAIBA - JU
	134111	Jalan dan Jembatan		437.108.198	
		<i>Jurnal Balik untuk mencatat (take-in) Nilai Jalan dan Jembatan setelah Revaluasi Gedung &amp; Bangunan. Lihat Jurnal umum Satker Konsolidasi PPATK JU 003 tgl 31-12-2018.</i>			
4	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	271.323.098		SAIBA - JU
	391114	Revaluasi Aset Tetap		271.323.098	
		<i>Jurnal Balik untuk mencatat (take-in) Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan setelah Revaluasi Gedung &amp; Bangunan. Lihat Jurnal umum Satker Konsolidasi PPATK JU 004 tgl 31-12-2018.</i>			
5	131111	Tanah	244.350.697.000		SAIBA - JU
	391114	Revaluasi Aset Tetap		244.350.697.000	
		<i>Jurnal Balik untuk mencatat (take-in) Nilai Tanah setelah Revaluasi Gedung &amp; Bangunan. Lihat Jurnal umum Satker Konsolidasi PPATK JU 005 tgl 31-12-2018.</i>			
6	391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	1.002.053.446		SAIBA - JU
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.002.053.446	
		<i>Jurnal untuk mencatat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena efek pembatalan catatan (take-out) nilai Gedung dan Bangunan. Lihat Jurnal umum Satker Konsolidasi PPATK JU 006 tgl 31-12-2018. --&gt; Akumulasi Gedung dan Bangunan Semester II - 2017.</i>			
7	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	16.578.510		SAIBA - JU
	391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		16.578.510	
		<i>Jurnal untuk mencatat (take-in) Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan karena efek pembatalan catatan (take-out) nilai Jalan dan Jembatan. Lihat Jurnal umum Satker Konsolidasi PPATK JU 007 tgl 31-12-2018. --&gt; Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Semester II - 2017.</i>			
8	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.002.053.447		SAIBA - JU
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.002.053.447	
		<i>Jurnal Balik atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan karena pembatalan Nilai Revaluasi. Ref. JU 006 tgl. 31 Des'2018, namun beda Rp1. --&gt; Akumulasi Gedung dan Bangunan Semester I - 2018</i>			
9	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	16.578.510		SAIBA - JU
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		16.578.510	
		<i>Jurnal Balik Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan karena take-out Revaluasi Aset Tetap. --&gt; Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Semester I - 2018.</i>			



F.4. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

No.	Kode Akun	Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan
10	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.002.021.059		SAIBA - JU
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.002.021.059	
		<i>Jurnal Balik atas Koreksi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan karena take-out Revaluasi Aset Tetap. Ref. JU 006 tgl. 31 Des'18, namun beda Rp32.337, untuk membatalkan beban penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2018. Perbedaan nilai sebesar Rp32.337 belum dapat ditelusuri penyebabnya sampai dengan tanggal pelaporan LK Tahun 2018 Audited. --&gt; Akumulasi Gedung dan Bangunan Semester II - 2018.</i>			
11	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	16.578.510		SAIBA - JU
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		16.578.510	
		<i>Jurnal Balik atas Koreksi Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan karena take-out Revaluasi Aset Tetap. --&gt; Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Semester II - 2018</i>			
12	313211	Transfer Keluar	14.765.778.000		SAIBA - JU
	131111	Tanah		14.765.778.000	
		<i>Jurnal Balik atas Koreksi transaksi Transfer Keluar Tanah pada 2018. Batal Transfer Keluar atas Kenaikan nilai Tanah Pusdiklat APUPPT dari Rp13.097.000.000 menjadi Rp27.862.778.000. Tanah NUP 3.</i>			
13	133111	Gedung dan Bangunan	4.480.600		SAIBA - JU
	313211	Transfer Keluar		4.480.600	
		<i>Jurnal Balik atas Koreksi transaksi Transfer Keluar Gedung dan Bangunan Tahun 2018. Batal Transfer Keluar Penurunan nilai pagar tanah Pusdiklat APUPPT dari Rp189.743.600 menjadi Rp185.263.000.</i>			
14	313211	Transfer Keluar	7.524.970		SAIBA - JU
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		7.524.970	
		<i>Jurnal Balik - Surat DJKN No. Und-45/KN/2019 tgl. 11 feb 2019 tentang Rekonsiliasi Dalam Rangka Pembatalan Penyajian Nilai Aset Tetap Hasil Penilaian Kembali (Take-Out Revaluasi) Tahun 2017-2018.</i>			
15	131111	Tanah	14.765.778.000		SAIBA - JU
	313221	Transfer Masuk		14.765.778.000	
		<i>Jurnal Balik - Surat DJKN No. Und-45/KN/2019 tgl. 11 feb 2019 tentang Rekonsiliasi Dalam Rangka Pembatalan Penyajian Nilai Aset Tetap Hasil Penilaian Kembali (Take-Out Revaluasi) Tahun 2017-2018.</i>			
16	313221	Transfer Masuk	4.480.600		SAIBA - JU
	133111	Gedung dan Bangunan		4.480.600	
		<i>Jurnal Balik - Surat DJKN No. Und-45/KN/2019 tgl. 11 feb 2019 tentang Rekonsiliasi Dalam Rangka Pembatalan Penyajian Nilai Aset Tetap Hasil Penilaian Kembali (Take-Out Revaluasi) Tahun 2017-2018.</i>			
17	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.524.970		SAIBA - JU
	313221	Transfer Masuk		7.524.970	
		<i>Surat DJKN No. Und-45/KN/2019 tgl. 11 feb 2019 tentang Rekonsiliasi Dalam Rangka Pembatalan Penyajian Nilai Aset Tetap Hasil Penilaian Kembali (Take-Out Revaluasi) Tahun 2017-2018.</i>			
18	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.002.053.447)		SAIBA - JU
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(1.002.053.447)	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
19	391116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	1.002.053.446		SAIBA - JU
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.002.053.446	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
20	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	16.578.510		SAIBA - JU
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		16.578.510	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			





F.4. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

No.	Kode Akun	Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan
21	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	16.578.510	-	SAIBA - JU
	391116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	-	16.578.510	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
22	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.002.021.059)	-	SAIBA - JU
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	(1.002.021.059)	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
23	391116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	1.002.053.446	-	SAIBA - JU
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	1.002.053.446	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
24	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	16.578.510	-	SAIBA - JU
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	16.578.510	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
25	391116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	(16.578.510)	-	SAIBA - JU
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	(16.578.510)	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
26	131111	Tanah	14.765.778.000	-	SAIBA - JU
	313211	TransferKeluar	-	14.765.778.000	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
27	313211	TransferKeluar	4.480.600	-	SAIBA - JU
	133111	GedungdanBangunan	-	4.480.600	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
28	313221	TransferMasuk	14.765.778.000	-	SAIBA - JU
	131111	Tanah	-	14.765.778.000	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
29	133111	GedungdanBangunan	4.480.600	-	SAIBA - JU
	313221	TransferMasuk	-	4.480.600	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
30	313221	TransferMasuk	7.524.970	-	SAIBA - JU
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	7.524.970	
		<i>Jurnal Balik - (S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)</i>			
31	391114	Revaluasi Aset Tetap	289.516.500.000		SAKTI - Modul Aset Tetap
	131111	Tanah		289.516.500.000	
		<i>Jurnal untuk menghapus Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Tanah berdasarkan LHIP-0050/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 6 Oktober 2017. Lokasi Tanah di Jakarta.</i>			
32	131111	Tanah	194.364.000.000		SAKTI - Modul Aset Tetap
	391114	Revaluasi Aset Tetap		194.364.000.000	
		<i>Jurnal untuk mencatat Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Tanah berdasarkan LHIP-358/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019. Lokasi Tanah di Jakarta.</i>			
33	391114	Revaluasi Aset Tetap	27.862.778.000		SAKTI - Modul Aset Tetap
	131111	Tanah		27.862.778.000	
		<i>Jurnal untuk menghapus Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Tanah berdasarkan LHIP-0050/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 6 Oktober 2017. Lokasi Tanah di Depok, Jawa Barat.</i>			





F.4. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

No.	Kode Akun	Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan	
34	131111	Tanah	28.784.107.000		SAKTI - Modul Aset Tetap	
	391114	Revaluasi Aset Tetap		28.784.107.000		
		<i>Jurnal untuk mencatat Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Tanah berdasarkan LHIP-357/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019. Lokasi Tanah di Depok, Jawa Barat.</i>				
35	391114	Revaluasi Aset Tetap	7.949.419.000		SAKTI - Modul Aset Tetap	
	131111	Tanah		7.949.419.000		
		<i>Jurnal untuk menghapus Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Tanah berdasarkan LHIP-0050/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 6 Oktober 2017. Lokasi Tanah di Cianjur, Jawa Barat.</i>				
36	131111	Tanah	8.256.529.000		SAKTI - Modul Aset Tetap	
	391114	Revaluasi Aset Tetap		8.256.529.000		
		<i>Jurnal untuk mencatat Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Tanah berdasarkan LHIP-356/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019. Lokasi Tanah di Cianjur, Jawa Barat.</i>				
37	391114	Revaluasi Aset Tetap	20.549.248.000		SAKTI - Modul Aset Tetap	
	133111	Gedung dan Bangunan		20.549.248.000		
		<i>Jurnal untuk menghapus Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Gedung dan Bangunan berdasarkan LHIP-0050/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 6 Oktober 2017. Lokasi Gedung Kantor di Cianjur, Jawa Barat.</i>				
38	133111	Gedung dan Bangunan	28.072.324.000		SAKTI - Modul Aset Tetap	
	391114	Revaluasi Aset Tetap		28.072.324.000		
		<i>Jurnal untuk mencatat Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Gedung dan Bangunan berdasarkan LHIP-...../WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019. Lokasi Gedung Kantor di Cianjur, Jawa Barat.</i>				
39	391114	Revaluasi Aset Tetap	185.263.000		SAKTI - Modul Aset Tetap	
	133111	Gedung dan Bangunan		185.263.000		
		<i>Jurnal untuk menghapus Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Pagar Permanen sebagai bagian dari Gedung dan Bangunan berdasarkan LHIP-...../WKN.07/KNL.04/2017 tanggal ..... 2017. Lokasi Gedung Kantor di Depok, Jawa Barat.</i>				
40	133111	Gedung dan Bangunan	175.736.000		SAKTI - Modul Aset Tetap	
	391114	Revaluasi Aset Tetap		175.736.000		
		<i>Jurnal untuk mencatat Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Pagar Permanen sebagai bagian dari Gedung dan Bangunan berdasarkan LHIP-...../WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019. Lokasi Gedung Kantor di Depok, Jakarta,.</i>				
41	391114	Revaluasi Aset Tetap	105.538.000		SAKTI - Modul Aset Tetap	
	134111	Jalan dan Jembatan		105.538.000		
		<i>Jurnal untuk menghapus Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Jalan berdasarkan LHIP-...../WKN.07/KNL.04/2017 tanggal ..... 2017. Lokasi Gedung Kantor di Cianjur, Jawa Barat.</i>				
42	134111	Jalan dan Jembatan	149.962.000		SAKTI - Modul Aset Tetap	
	391114	Revaluasi Aset Tetap		149.962.000		
		<i>Jurnal untuk mencatat Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap berbentuk Jalan berdasarkan LHIP-...../WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019. Lokasi Gedung Kantor di Cianjur, Jakarta,.</i>				





F.4. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

		Jurnal Perbaikan atas Hasil Revaluasi Aset Tetap		Jurnal Koreksi
43	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,002,053,447	
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		1,002,053,447
		<i>Jurnal Balik atas Jurnal No. 008 tanggal 31-12-2019</i>		
44	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,002,053,447	
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1,002,053,447
		<i>Perbaikan atas Jurnal No. 008 tanggal 31-12-2019</i>		
45	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	16,578,510	
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		16,578,510
		<i>Jurnal Balik atas Jurnal No. 009 tanggal 31-12-2019</i>		
46	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	16,578,510	
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		16,578,510
		<i>Perbaikan atas Jurnal No. 009 tanggal 31-12-2019</i>		
47	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,002,021,059	
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		1,002,021,059
		<i>Jurnal Balik atas Jurnal No. 010 tanggal 31-12-2019</i>		
48	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,002,021,059	
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1,002,021,059
		<i>Perbaikan atas Jurnal No. 010 tanggal 31-12-2019</i>		
49	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	16,578,510	
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		16,578,510
		<i>Jurnal Balik atas Jurnal No. 011 tanggal 31-12-2019</i>		
50	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	16,578,510	
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		16,578,510
		<i>Perbaikan atas Jurnal No. 011 tanggal 31-12-2019</i>		
51	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,002,053,447)	-
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	(1,002,053,447)
		<i>Jurnal Balik atas Jurnal No. 018 tanggal 31-12-2019</i>		
52	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1,002,053,447)	-
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	(1,002,053,447)
		<i>Perbaikan atas Jurnal No. 018 tanggal 31-12-2019</i>		
53	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	16,578,510	-
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	16,578,510
		<i>Jurnal Balik atas Jurnal No. 020 tanggal 31-12-2019</i>		
54	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	16,578,510	-
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	16,578,510
		<i>Perbaikan atas Jurnal No. 020 tanggal 31-12-2019</i>		
55	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,002,021,059	-
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	1,002,021,059
		<i>Jurnal Balik atas Jurnal No. 022 tanggal 31-12-2019</i>		
56	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,002,021,059	-
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	1,002,021,059
		<i>Perbaikan atas Jurnal No. 022 tanggal 31-12-2019</i>		
57	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	16,578,510	-
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	16,578,510
		<i>Jurnal Balik atas Jurnal No. 024 tanggal 31-12-2019</i>		
58	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	16,578,510	-
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	16,578,510
		<i>Perbaikan atas Jurnal No. 024 tanggal 31-12-2019</i>		
		<b>Jumlah</b>	<b>998,034,492,434</b>	<b>998,034,492,434</b>






Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami dan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan masukan dari tim pemeriksa.

Jakarta, 4 Mei 2021

Kepala PPATK,



Dian Ediana Rae





**PPATK**

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120